

**EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN  
DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DIKECAMATAN BANDAR SEI KIJANG KABUPATEN  
PELALAWAN**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar magister sains**



**OLEH :**

**NAMA : ASA ARI**  
**NOMOR MAHASISWA : 187121007**  
**BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2019**

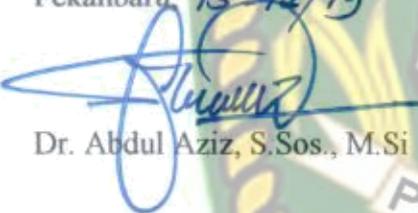
**EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN  
DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DIKECAMATAN BANDAR SEI KIJANG  
KABUPATEN PELALAWAN**

**TESIS**

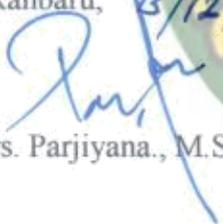
Nama : Asa Ari  
NPM : 187121007  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

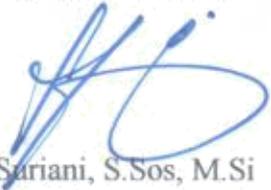
Pembimbing I  
Pekanbaru, 13/12/19

  
Dr. Abdul Aziz, S.Sos., M.Si

Pembimbing II  
Pekanbaru, 13/12/2019

  
Drs. Parjiyana., M.Si

Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik  
Universitas Islam Riau

  
Lilis Sariyani, S.Sos, M.Si

**EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN  
DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DIKECAMATAN BANDAR SEI KIJANG  
KABUPATEN PELALAWAN**

---

TESIS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Oleh  
**Asa Ari  
NPM : 187121007**

**TIM PENGUJI**

Ketua



Dr. Abdul Aziz, S.Sos., M.Si

Sekretaris



Drs. Parjiyana., M.Si

Anggota



Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si

Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau



Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## SURAT PERYATAAN KEASLIAN

Saya mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Riau Program Studi Administrasi Publik peserta ujian komprehensif penelitian yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asa Ari  
NPM : 187121007  
Run : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan: Strata Dua (S 2)  
Judul Tesis : Evaluasi Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumentasi persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Tesis ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 Desember 2019  
Pembuat pernyataan



Asa Ari

# EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DIKECAMATAN BANDAR SEI KIJANG KABUPATEN PELALAWAN

## ABRTRAK

Oleh  
ASA ARI

Penelitian ini dilatar belakangi oleh isu kemiskinan menjadikan Negara Indonesia yang sedang mencari berbagai solusi untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Negara harus bersedia membuka berbagai program untuk menanggulangi kemiskinan. Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI membuat program khusus untuk mengentas kemiskinan yang disebut program keluarga harapan. Untuk mengikuti perkembangan dan mengatasi persoalan – persoalan yang muncul kebijakan program keluarga harapan terus melakukan Evaluasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi program keluarga harapan di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dan faktor – factor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dari *informan*, yaitu camat Bandar Sei Kijang, kasi kesejahteraan sosial, koordinator kecamatan, pendamping sosial, dan keluarga penerima manfaat. Data sekunder diperoleh dari dokumen penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Evaluasi program keluarga harapan di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan belum berjalan dengan optimal, Kemudian faktor penghambat, terbatasnya sarana dan prasarana, komunikasi dan koordinasi yang kurang efektif, sumber daya manusia atau petugas PKH yang belum diklat, tidak berjalannya bisnis PKH yaitu FDS atau kegiatan pemberdayaan yang tidak semestinta, faktor kecemburuan sosial antara masyarakat yang tidak menerima PKH kepada masyarakat yang menerima PKH.

**Kata kunci:** Evaluasi, Program, Kemiskinan

# ***Family Hope Program Evaluation in Poverty Reduction in Bandar Sei Kijang District Pelalawan Regency***

## **ABSTRACT**

By  
Asa Ari

*This research is motivated by the issue of poverty making the Indonesian State who are looking for various solutions to overcome the problem of poverty. The state must be willing to open various programs to alleviate poverty. The Government through the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia has created a special program to eradicate poverty called the family of hope program. To keep abreast of developments and overcome the problems that arise the policy of the hope family program continues to evaluate. The purpose of this study was to determine the family hope program evaluation in Bandar Sei Kijang Sub-District, Pelalawan Regency and its inhibiting factors. This study uses a descriptive qualitative research method approach. Primary data were obtained directly through interviews from informants, namely Bandar Sei Kijang sub-district head, social welfare head, sub-district coordinator, social assistant, and beneficiary families. Secondary data were obtained from research documents. The results of this study indicate that the Family Hope Program evaluation in Bandar Sei Kijang District Pelalawan Regency has not run optimally, Then the inhibiting factors, limited facilities and infrastructure, communication and coordination are less effective, human resources or PKH officers who have not been trained, business does not run, PKH is FDS or empowerment activities that are not as desirable, a factor of social jealousy between people who do not receive PKH to people who receive PKH.*

**Keywords:** *Evaluation, program, poverty*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Tesis ini dapat penulis selesaikan.

Tesis yang berjudul “ Evaluasi Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan” ini penulis tulis dan ajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar Magister strata dua.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab Tesis ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Tesis ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Tesis ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
3. Ibu Lilis Suriani, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi yang telah memberikan semangat, dorongan dan bimbingan selama masa perkuliahan.
4. Bapak Dr. Abdul Aziz, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan penulis mulai dari awal penelitian hingga selesainya penyusunan tesis ini.
5. Bapak Drs. Parjiana., M.Si selaku Pembimbing II yang juga telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan penulis mulai dari awal penelitian hingga selesainya penyusunan tesis ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Program Studi Magister Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau.

7. Seluruh staf, karyawan/karyawati tata usaha Pasca Sarjana Universitas Islam Riau dan serta perpustakaan Universitas Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan Administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan Tesis ini.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Administrasi Publik angkatan tahun 2018 terkhusus kelas A, dan adik-adik tingkat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan Tesis ini.
9. Buat keluarga tercinta yang selalu memberi dukungan dan motivasi saat penulis mengalami kendala dalam study ini.

Penulis bermohon kepada yang maha kuasa semoga jasa baik beliau semua dibalas dengan Rahmat dan karunia yang setimpal, aamiin.

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa, dan dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca.

Wabillaitaufik wal hidayah, wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 07 Desember 2019

Asa ari  
NPM.18712007

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>ABSTRACT/ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Evaluasi Kebijakan program .....	12
2.2 Pengertian program .....	16
2.2.2 Pelaksanaan Program .....	18
2.3.1 Program keluarga harapan.....	20
2.4.1 konsep pemberdayaan masyarakat.....	21
2.4.2 Tujuan pemberdayaan .....	24
2.4.3 Indikator pemberdayaan .....	25
2.5.1 Konsep kemiskinan .....	26
2.5.2 Jenis-jenis kemiskinan .....	28
2.5.3 Variabel kemiskinan.....	32
2.6.1 Penelitian terdahulu .....	33
2.7 Kerangka berpikir .....	38
2.8 Konsep operasional .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis penelitian .....	40
3.2 Lokasi Penelitian .....	40
3.3 Informan Penelitian .....	41
3.4 Jenis data dan Sumber Data .....	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	43
3.6 Analisa data .....	45

3.7 Jadwal kegiatan penelitian .....	47
<b>BAB IV TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Kecamatan Bandar Sei Kijang .....	48
4.2 Gambaran Umum Program Keluarga Harapan .....	49
4.2.1. Dasar Hukum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan ..	49
4.2.2. Tujuan Program Keluarga Harapan .....	50
4.2.3. Hak dan kewajiban KPM PKH .....	51
4.2.4. Sanksi Keluarga Penerima manfaat PKH .....	52
4.2.5. Besaran Bantuan PKH .....	53
4.2.6. Kelembagaan PKH .....	54
4.2.7. Kegiatan Program Keluarga Harapan .....	56
4.2.8. Pendamping Sosial .....	57
4.2.9. Ciri-Ciri KPM PKH Yang Berhasil .....	58
4.3 PKH Di Kecamatan Bandar Sei Kijang .....	58
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1. Karakteristik Informan .....	60
5.2. Evaluasi PKH di Kecamatan Bandar Sei Kijang .....	62
5.2.1. Derajat Pencapaian Sasaran dan Tujuan .....	63
5.2.2. Beberapa Biaya dan Manfaat dari Suatu Kebijakan .....	65
5.2.3. Outcome .....	68
5.2.4. Dampak .....	70
5.2.5. Target .....	74
5.2.6. Sebagai Bahan Masukan Bagi Kebijakan Yang Akan Datang .....	75
5.3. Faktor-Faktor Penghambat Evaluasi PKH di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan .....	76
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
6.1. Kesimpulan .....	80
6.2. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

### Tabel Halaman

1.1 Tabel Cukupan Program Keluarga Harapan Tahun 2007-2012 sumber : <i>Kementrian Sosisal, Profil Program Keluarga Harapan, 2013</i> .....	4
1.2 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2007-2016 sumber : <i>Kementrian Sosial RI dan Bappenas, 2015</i> .....	5
1.3 Jumlah Keluarga Penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kabupaten Pelalawan Tahun 2018, <i>Sumber : UPPKH Kecamatan Bandar Sei Kijang (Kantor Camat Bandar Sei Kijang</i> .....	7
1.4 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dikecamatan Bandar Sei Kijang Tahun 2018, <i>Sumber : UPPKH Kecamatan Bandar Sei Kijang (Kantor Camat Bandar Sei Kijang)</i> .....	7
2.1 Tabel Penelitian Terdahulu .....	36
3.1 Tabel Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian .....	47
4.1 Nama Kelurahan/Desa di Kecamatan Bandar Sei Kijang .....	48
4.2 Ketentuan Indeks dan Komponen Bantuan PKH .....	54
4.3 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Tahun 2018 .....	59
4.4 Petugas PKH Kecamatan Bandar Sei Kijang .....	59
5.1 Karakteristik Informan .....	61
5.2 Ketentuan Indeks dan Komponen Bantuan PKH .....	68

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Gambar Kerangka Berpikir .....	38
4.1 Gamabar Kelembagaan PKH Tingkat Pusat-Tingkat Kecamatan.....	55
4.2 Gamabar Kegiatan Program Keluarga Harapan .....	57



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara besar dan negara sedang berkembang yang memiliki hampir 264 juta penduduk, tentunya Indonesia tidak lepas dari isu kemiskinan, ketimpangan dan kesenjangan antara pendapatan si kaya dan si miskin, untuk mengatasi persoalan kemiskinan tersebut dibutuhkan peran aktif pemerintah dari suatu orde ke orde selanjutnya.

Menurut Sulistiyani (2004: 27-28) menyatakan bahwa Kemiskinan merupakan kondisi yang jauh dari keadaan yang disebut sejahtera. Sejahtera merupakan kondisi dimana seseorang berada pada suatu kondisi telah mampu memenuhi kebutuhan diluar kebutuhan dasar.

Proses pemerintahan yang sedang berlangsung pada saat ini juga menghadapi persoalan yang serupa, yaitu kemiskinan. Dalam menanggulangi kemiskinan yang kronis pada saat ini tidak lagi dibutuhkan perdebatan tentang konsep yang akan menghabiskan energi dan waktu. Masyarakat miskin tidak membutuhkan konsep perdebatan retorik yang cenderung berhasil dalam wacana saja. Faktor pendukung yang paling *urgent* dalam menanggulangi kemiskinan pada saat ini adalah adanya kesepakatan dan satu tujuan bersama terhadap konsep mengatasi kemiskinan dan kemudian di implementasikan secara maksimal dan melakukan evaluasi sebaik mungkin untuk mengentas kemiskinan.

Berbagai bentuk program dan stimulus yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah dalam menanggulangi dan pengetasan kemiskinan selama ini belum

memberikan dampak yang begitu maksimal sehingga sampai saat ini tujuan dari rencana pembangunan nasional terkait permasalahan dan peningkatan kesejahteraan sosial masih menjadi masalah yang belum teratasi secara maksimal. Dikarenakan berbagai bentuk program penanggulangan kemiskinan yang ada sebelumnya tidak berfungsi secara maksimal maka pemerintah secara sinergi dan sistematis membentuk program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH).

Pemerintah melalui Kementerian Sosial pada tahun 2007 meluncurkan sebuah program pengentasan kemiskinan yang dinamakan program keluarga harapan (PKH), Program bantuan dana tunai bersyarat pertama di Indonesia. Menurut Permensos No 01 Tahun 2018, tentang (PKH) Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat. Program Keluarga Harapan merupakan program yang berbasis keluarga miskin atau keluarga sangat miskin, sehingga yang menjadi sasaran utama adalah keluarga miskin yang tidak mampu secara ekonomi dan rentan akan kesenjangan sosial.

Secara umum Program Keluarga Harapan memiliki tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga penerima manfaat dan program keluarga harapan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat dalam jangka pendek serta memutus

rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Program ini sejalan dengan perwujudan dari Pancasila yaitu perwujudan Sila ke-5 Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Program Keluarga Harapan juga sejalan dengan perwujudan Pasal 34 Undang – Undang Dasar 1945 yaitu fakir miskin dan anak – anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Dengan demikian Pasal 34 Undang – Undang Dasar 1945 memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin. Dan untuk melaksanakan amanat Undang Undang Dasar tahun 1994 pasal 34 dibuatlah Undang – Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang – Undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang menjadi payung hukum dibuatnya program keluarga harapan oleh Kementerian Sosial. Sedangkan secara khusus tujuan Program Keluarga Harapan (Permensos nomor 01 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 2) adalah

1. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan , kesehatan dan kesejahteraan sosial;
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
5. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat

Ketika program keluarga harapan diluncurkan pada tahun 2007, penerima manfaat program yang dipilih yaitu mereka yang berada dibawah 80% garis kemiskinan resmi saat itu. Karena pada awalnya program ini merupakan program rintisan cakupan awal pun sangat rendah. Hingga tahun 2012, program ini hanya menjangkau 1,5 juta keluarga, dibanding total 60 juta keluarga miskin di Indonesia serta 6,5 juta keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan. Program keluarga harapan diharapkan menjangkau 3,2 juta rumah tangga di akhir tahun 2014. Pada tahun 2012 akhirnya, Program keluarga harapan menjangkau seluruh Provinsi di Indonesia, meski belum menjangkau seluruh kabupaten yang ada ditiap provinsi.

**Tabel 1.1. Cakupan Program Keluarga Harapan Tahun 2007 – 2012**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah Rumah Tangga (Juta)	0,388	0,621	0,726	0,774	1,052	1,454
Anggaran (Juta USD PPP)	79,24	113,06	126,68	146,04	210,18	228,28
	4	5	8	9	1	7
Provinsi ( dari total 33)	7	13	13	20	25	33
Kab/Kota ( dari total 497 pada tahun 2010)	48	70	70	88	119	169
Kecamatan	337	637	781	946	1.387	2.0001
Desa	4311	7654	9295	10.998	16.154	25.032

Sumber : Kementerian Sosial, *Profil Program Keluarga Harapan, 2013*

Dari tabel1.1 diatas, pada tahun 2012 program keluarga harapan di perluas di 33 provinsi bahkan pada tahun 2012 Program keluarga Harapan telah menjadi program nasional. Adapun yang dimaksud program nasional yaitu ; pertama, Program Keluarga Harapan telah menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Kedua, pelaksanaan program keluarga harapan dilakukan secara bersama – sama oleh masing – masing kementerian dan lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing kementerian dan lembaga.

**Tabel 1.2. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2007 -2016**

No	Jumlah KPM PKH	Anggaran ( M )	Tahun
1	0,39 Juta KPM	508,0 M	2007
2	0,62 Juta KPM	76.6 M	2008
3	0,73 Juta KPM	923,9 M	2009
4	0,77 Juta KPM	929,4 M	2010
5	1,052.2 Juta KPM	1,282.2 M	2011
6	1,492.5 Juta KPM	1,867.0 M	2012
7	2,326.5 Juta KPM	3,536.0 M	2013
8	2,797.8 Juta KPM	5,548,0 M	2014
9	3,500.0 Juta KPM	6,471.0 M	2015
10	6,000.0 Juta KPM	10,039.0 M	2016

*Sumber : Kementerian Sosial RI dan Bappenas, 2015*

Dari tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa keseriusan pemerintah melalui Kementerian Sosial serius untuk pengentasan kemiskinan terlihat dari jumlah penerimaan keluarga penerima manfaat setiap tahun semakin bertambah.

Program keluarga harapan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial, sudah sejak tahun 2007 digulirkan di Provinsi Riau. Dari 12 Kabupaten atau Kota di Provinsi Riau, baru dua Kabupaten yang mendapatkan jatah lokasi anggaran program keluarga harapan yaitu Kabupaten Kampar dan Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan dijadikan program keluarga harapan menjadi program nasional maka program tersebut menjangkau ke 12 Kabupaten atau Kota yang ada di Provinsi Riau termasuk salah satunya Kabupaten Pelalawan yang menjadi sasaran program keluarga harapan yang diharapkan kedepannya program tersebut dapat membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam permasalahan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.

Sasaran PKH (Program Keluarga Harapan) merupakan keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Beberapa kriteria-kriteria Program Keluarga Harapan (Permensos nomor 01 tentang Program Keluarga Harapan pasal 5) yaitu :

1. Kriteria komponen kesehatan :
  - a. Ibu hamil atau menyusui; dan
  - b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Kriteria komponen pendidikan
  - a. Anak sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau sederajat
  - b. Anak sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah atau sederajat
  - c. Anak sekolah menengah atas atau madrasah aliyah atau sederajat
  - d. Anak sekolah usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial
  - a. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun
  - b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

**Tabel.1.3 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Tahun 2018**

No	Nama Desa/Kelurahan	Tahap Penyaluran			
		I	II	III	IV
1	Kiap jaya	69	64	61	61
2	Lubuk Ogung	75	75	75	73
3	Muda Setia	60	55	55	55
4	Seikijang	162	156	162	161
5	Simpang Beringin	39	39	35	33
<b>Jumlah</b>		405	389	388	383

Sumber : UPPKH Kecamatan Bandar Seikijang (Kantor Camat Bandar Seikijang , 2018

Dari data tabel 1.3 diatas jumlah keluarga miskin di kecamatan Bandar Sei Kijang tahap pertama sampai tahap keempat ada penurunan angka kemiskinan. Oleh sebab itu dengan adanya program keluarga harapan dari pemerintah pusat membantu pemerintah daerah dalam persoalan dalam penanggulangan dan mengentaskan kemiskinan.

**Tabel.1.4 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Tahun 2018**

No	Tahapan pencairan dalam satu tahun	Jumlah KPM	Jumlah yang diberi per orang	Nominal
1	Tahap pertama	405	500.000	202.500.000
2	Tahap kedua	389	500.000	194.500.000
3	Tahap ketiga	388	500.000	194.000.000
4	Tahap keempat	383	266.350	102.012.050
<b>Jumlah</b>			<b>1.766.350</b>	<b>693.012.050</b>

Sumber : UPPKH Kecamatan Bandar Seikijang (Kantor Camat Bandar Seikijang , 2018

Dari data tabel 1.4 menunjukkan bahwa pemerintah pusat dalam hal ini kementerian sosial telah turut membantu pemerintah daerah, dalam hal ini kemiskinan di kecamatan Bandar Sei Kijang ada penurunan angka kemiskinan. Oleh sebab itu dengan adanya program keluarga harapan dari pemerintah pusat membantu pemerintah daerah dalam persoalan dalam penanggulangan dan mengentaskan kemiskinan jadi dalam satu tahun pemerintah pusat memberikan empat kali dalam satu tahun pertiga bulan.

Kecamatan Bandar seikijang Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan program keluarga harapan pada tahun 2015. Program ini merupakan suatu kebijakan yang didesain untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Namun demikian, ada berbagai isu atau fenomena yang muncul dilapangan dimana ada kesenjangan program keluarga harapan yang telah didesain pemerintah melalui Kementerian Sosial pada aplikasinya dilapangan, dan untuk mengatasi persoalan – persoalan yang muncul maka program keluarga harapan terus melakukan penilaian atau evaluasi.

Menurut Subarsono (2005) evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan (derajat pencapaian sasaran dan tujuan).
2. Mengukur tingkat efesiensi suatu kebijakan (berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan).

3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran output dari suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
5. Mengetahui penyimpangan (membandingkan sasaran dan tujuan dengan target).
6. Sebagai bahan masukan bagi kebijakan yang akan datang.

Jika semua tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut dapat dipenuhi dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kegiatan program keluarga harapan, maka evaluasi program keluarga harapan dikecamatan Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dinyatakan optimal sesuai dengan tujuannya yaitu mengentaskan dan menanggulangi kemiskinan.

Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan yang dilakukan di Bandar Sei Kijang, penulis menemukan fenomena sebagai berikut, program keluarga harapan sudah melakukan evaluasi-evalusai dalam menghadapi persoalan – persoalan, Walaupun sudah berevaluasi tetap saja ada ditemukan kesenjangan antara *das Sain* dengan *das sollen* seperti sasaran utama program keluarga harapan adalah keluarga miskin atau keluarga sangat miskin yang memenuhi syarat atau komponen dan terdaftar di data base kementrian sosial akan tetapi masih saja ada keluarga penerima manfaat program keluarga harapan yang mampu secara ekonomi namun ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat bahkan keluarga

penerima manfaat program keluarga harapan yang seharusnya menjadi sasaran utama program komplementaritas seperti KIP,KIS,KKS,Rastra, E-warong Kube, Rutilahu, Subsidi LPG, Subsidi Pupuk, Subsidi PLN, Bansos Pemda yang seharusnya Keluarga peneriman manfaat program keluarga harapan menjadi prioritas utama tidak dapat bantuan tersebut, dan bahkan karena disebabkan banyaknya program – program bantuan sosial dari pemerintah meningkatnya keinginan masyarakat yang merasa miskin supaya dapat bantuan sosial dari pemerintah terkhusus bantuan sosial program keluarga harapan, serta yang menjadi sasaran program keluarga harapan yaitu jenis kemiskinan absolut akan tetapi yang mendapat bantuan sosial tersebut rata – rata jenis kemiskinan relatif,

Maka berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Evaluasi Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan”**.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan?
- b. Apa Faktor-faktor Penghambat Evaluasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengevaluasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Evaluasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.

### 1.4. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui karya ilmiah serta penulis menerapkan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dalam memecahkan masalah dan mencari solusinya serta diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi perpustakaan Program Studi Magister Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau, dan menjadi alternative referensi peneliti yang berminat melakukan penelitian pada program – program Pemerintah.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini mampu memberikan informasi kepada *stakeholder* yang berkepentingan pada pemberantasan kemiskinan di Negara Republik Indonesia, terutama Kementerian Sosial RI, Pemerintah Daerah yang telah ikut serta melaksanakan atau belum, serta LSM/NGO yang Fokus terhadap memangkas kemiskinan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka terdiri dari teori dan konsep yang dipaparkan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Maka perlu adanya teori – teori yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji, sehingga permasalahan ini mampu disesuaikan dengan yang diharapkan.

#### 2.1 Evaluasi Kebijakan program

Bila kebijakan atau suatu program di pandang sebagai suatu pola kegiatan yang berurutan, maka evaluasi merupakan tahap akhir dalam suatu kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasarnya, kebijakn publik di jalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan tujuan tertentu yang terangkat dari masalah – masalah yang telah di rumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Sering kali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab – sebab kegagalan sesuatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan.

Pada dasarnya suatu evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sejauh mana program – program kebijakan yang telah dijalankan mampu

menyelesaikan masalah – masalah publik. Ini berarti bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sejauh mana tingkat efektifitas dan efisiensi suatu program kebijakan di jalankan untuk memecahkan masalah – masalah yang ada. Tidak semua masalah publik dapat di pecahkan oleh program – program kebijakan atau dengan kata lain, tidak semua program kebijakan atau dengan kata lain, tidak semua program kebijakan yang dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Bila kondisi seperti ini yang terjadi maka akan menimbulkan pernyataan, mengapa program kebijakan gagal meraih dampak yang diinginkan. Evaluasi kebijakan berguna dalam melihat sebab – sebab kegagalan tersebut.

Untuk memecahkan masalah – masalah yang ada. Tidak semua masalah publik dapat di pecahkan oleh program – program kebijakan atau dengan kata lain, tidak semua program kebijakan yang di jalankan meraih dampak yang diinginkan, bila kondisi seperti ini yang terjadi maka akan menimbulkan pernyataan mengapa program kebijakan gagal meraih dampak yang diinginkan ? evaluasi kebijakan berguna dalam melihat sebab – sebab kegagalan tersebut.

Menurut **Anderson dalam Winarno (2002:166)** Evaluasi kebijakan itu dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak, dalam hal ini, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi perumusan masalah – masalah kebijakan, program –

program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun dampak kebijakan.

Ada 3 tipe evaluasi kebijakn publik menurut Anderson dalam Winarno (2002:167) yaitu :

- a. Tipe evaluasi kebijakan fungsional
- b. Tipe evaluasi yang memfokuskan diri terhadap bagaimana bekerjanya suatu kebijakan
- c. Tipe evaluasi kebijakan sistematis.

Menurut Suchman dan Winarno (2002:169) mengidentifikasi beberapa pernyataan oprasional untuk menjalankan riset evaluasi yakni :

- 1) Apa saja yang menjadi isi dari tujuan program
- 2) Siapa yang menjadi target program
- 3) Kapan perubahan yang diharapkan
- 4) Apakah tujuan yang di tetapkan satu atau banyak
- 5) Apakah dampak yang di harapkan besar
- 6) Bagaimana tujuan – tujuan tersebut dicapai

Secara umum, evaluasi yang mendasar diri pada analisis ekonomi ini mampu menyajikan informasi yang meyakinkan ( semisal digunakannya rumus – rumus maematikan dan data – data statistik), namun ia tidak sanggup memperhitungkan serta membebarkan berbagai aspek penting dari perkembangan kebijakan terutama sekali kenapa kebijakan – kebijakan pembangunan tertentu berhasil atau gagal, **Wahab (2008:229-233)**.

Menurut Nagel dalam tangkilisan (2005:1-2) mementukan lima unsur pokok evaluasi kebijakan yaitu :

- 1) Tujuan (*Goals*) termasuk kendala normatif dan pertimbangan relatif untuk mencapai tujuan.
- 2) Kebijakan, program, proyek, keputusan, pilihan, sarana atau alternatif lain yang tersedia untuk mencapai tujuan.
- 3) Hubungan antara kebijakan dan tujuan termasuk hubungan yang berbentuk oleh intuisi, kewenangan, statistik, pengamatan, dedukasi, perkiraan atau sarana lainnya.
- 4) Penarikan kesimpulan tentatif sebagai kebijakan atau kombinasi kebijakan yang mana yang paling baik untuk di adopsi, dalam hal tujuan, kebijakan dan hubungan.
- 5) Mementukan apa yang akan dilakukan, memetakan alternatif kebijakan.

Menurut **Wibawa dalam Nugroho (2004:186)** evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi yaitu :

1. Eksplanasi  
Melalui evaluasi dapat di potret realitas pelaksanaan program dan di buat suatu generalisasi tentang pola – pola hubungan antar berbagai dimensirealitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluasi dapat mengidentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
2. Kepatuhan  
Melalui evakuasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, nbaik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan kebijakan.
3. Audit  
Melalaui evalusi dapat diketahui apakah uotput benar – benar sampai ketanga kelompok sasaran kebjakan atau justru ada kebocoran sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpanga.

#### 4. Akunting

Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial – ekonomi dari kebijakan tersebut.

Menurut Subarsono (2005) evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan (derajat pencapaian sasaran dan tujuan).
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan (berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan).
3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran output dari suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
5. Mengetahui penyimpangan (membandingkan sasaran dan tujuan dengan target).
6. Sebagai bahan masukan bagi kebijakan yang akan datang.

#### 2.2.1 Pengertian program

Menurut Hardjito (2007:79) menjelaskan program dapat diartikan menjadi dua istilah yaitu program dalam arti khusus dan program dalam arti umum. Pengertian secara umum dapat di artikan bahwa program adalah sebuah bentuk rencana yang akan di lakukan apabila “program ini di kaitan langsung dengan evaluasi program maka progrm didefenisikan sebagai unit untuk kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan , berlangsung dalam proses yang berekesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Menurut (Arikunto & Safruddin, 2009:4) terdapat 3 unsur program yang harus di perhatikan yaitu :

1. Realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan
2. Terjadi dalam kurun waktu yang lama da bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan
3. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat di selesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu, sebuah program dapat berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama. Menurut Arikunto & Safruddin (2009:4) pengertian program adalah suatu unita= atau kesatuan kegiatan maka program sebuah sistem, yaitu rangkaian yang di lakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambunga.

Arikunto (2009:290) ada beberapa pengertian tentang “program” itu sendiri di dalam kamus tertulis:

1. Program adalah rencana
2. Program adalah kegiatan yang di rencanakan dengan seksama

Didalam program terdapat beberapa kegiatan – kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dan untuk melaksanakan suatu program di perlukan anggaran. Menurut Manullang (2008:43) program adalah campuran dari politik dan budget, yang di maksudkan untuk menetapkan suatu rangkaian tindakan untuk waktu yang akan datang.

Selanjutnya Mustopadidjaja (2004:73) memberikan pemahaman mengenai pengertian program yaitu kebijakan secara oprasional di jabarkan dalam program – program yang di dalamnya mengandung langkah – langkah yang di lakukan program harus mencerminkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah , berkaitan dengan kebijakan serta program nasional dan daerah.

### 2.2.2 Pelaksanaan Program

Pelaksanaan merupakan hal untuk melihat perencanaan yang di buat itu berhasil atau sebaliknya. Athoillah (2010:110) kegagalan dalam melaksanakan perencanaan atau kesulitan – kesulitan yang di hadapai biasanya di sebabkan oleh hal berikut :

1. Perencanaan (*planner*) kurang ahli
2. Kurang wewenang dalam penyusunan perencanaan
3. Tenaga pelaksanaan dari perencanaan tersebut kurang cakap.
4. Keungan tidak mencukupi untuk menerapkan perencanaan
5. Tidak ada dukungan (intern maupun ekstern)
6. Terjadinya perubahan – perubahan situasi secara drastis

Menurut Arikunto & Safruddin (2009:4) pelaksanaan program selalau terjadi dalam sebuah organisasi yang artinya harus melibatkan sekelompok orang. Dengan adanya proses kerjasama di dalam organisasi menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan program.

Solichin (2005:62) dalam implementasi program, khususnya yang melibatkan sekelompok orang. Dengan adanya proses kerjasama di dalam organisasi menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan program.

Solichin (2005:62) dalam implementasi program, kusus yang melibatkan banyak organisasi / instansi pemerintah atau berbagai tingkatan struktur ogansasi pemerintah sbebnarnya dapat di bagi dari 3 (tiga) sudut pandang yakni :

- a. Pemeraksaan kebijakan / pembuat kebijakan (*the center* atau pusat)

- b. Pejabat – pejabat pelaksanan di lapangan (*the periphery*)
- c. Aktor – aktor perorangan di luar badan – badan pemerintah kepada siapa program itu di tujukan,yakni kelompok sasaran (*target group*).

Dalam perakteknya implementasi program sering mendapatkan masalah – masalah baru yaitu umumnya di sebabkan kesenjangan – kesenjangan antara waktu penetapan atau kebijaksanaannya. Sehingga organisasi yang mengoprasonalkan impelementasi program harus hirarki dalam kepengurusannya. Jadi program dapat di katakan sebagai kebijaksanaanya yang telah di sepakati dan di komunikasikan untuk dilaksanakan dari atas hingga bawah.

Suatu program sudah terlaksana atau belum terlaksana dapat dilihat melalui evaluasi program, untuk mengetahui efektifitas program dalam mendukung pencapaian tujuan program. Evaluasi program menurut (Arikunto & Safruddin 2009:4) adalah upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kebijakan secara cermat dengan cara mengetahui efektifitas masing – masing komponennya.

Menurut Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau setiap pelaksanaan program perlu memperhatikan beberapa perinsip – perinsip di dalam penanganan langsung kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

- a. Penerimaan

Menerima dan mengormati setiap penerimaan pelayanan dalam keadaan apapun atau dalam setiap kondisi yang di alami penerima pelayanan tanpa menghakimi.

b. Komunikasi

Yaitu saling memberi dan menerima informasi antara pemberi pelayanan dengan penerima pelayanan.

c. Individualisasi

Memahami dan menerima bahwa setiap penerima pelayanan memiliki keunikan sehingga ia berbeda dengan orang lain.

d. Partisipasi

Pencapaian suatu tujuan pelayanan sangat ditentukan oleh partisipasi aktif dari pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, sehingga merupakan syarat mutlak bagi pelayanan untuk berperan aktif terutama dalam pengambilan keputusan untuk suatu pelayanan atau terapi.

e. Kerahasiaan

Semua informasi yang menyangkut pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial harus di rahasiakan demi harga diri dan keamanannya.

Selain dari berbagai faktor di atas, sosialisasi merupakan salah satu faktor penting dalam melaksanakan suatu program. Penyampaiannya program melalui sosialisasi yang baik akan membuat masyarakat menjadi lebih mengerti tentang kegunaan program yang di buat oleh pemerintah.

### 2.3.1 Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data informasi kesejahteraan sosial

dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat dan kriteria penerima bantuan sosial program keluarga harapan , yaitu : (Permensos No 01 Tahun 2018)

- a. Memiliki komponen kesehatan yakni anak dengan usia di bawah 6 tahun, ibu hamil/menyusui, termasuk anak penyandang disabilitas ringan/ sedang.
- b. Memiliki komponen pendidikan anak usia sekolah 6 hingga 21 tahun untuk peserta pendidikan SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat dan/atau SMA/MA sederajat, termasuk Anak penyandang disabilitas ringan/ sedang.
- c. Memiliki komponen kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas Berat di dalam keluarga peserta PKH. Penyandang Disabilitas Berat adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama kedisabilitasinya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan/atau sepanjang hidupnya pada bantuan/pertolongan orang lain, tidak mampu menghidupi diri sendiri, serta tidak dapat berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan lainnya (Sumber: Pedoman Pelaksanaan Pemberian Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat, 2015)
- d. Memiliki komponen kesejahteraan sosial untuk lanjut usia 60 tahun ke atas di dalam keluarga peserta PKH

#### 2.4.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerments*) berasal dari *power* yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Harry ( 2010 ; 3 )

mengungkapkan bahwa konsep pemberdayaan selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan.

Teori diatas mirip dengan yang di ungkapkan oleh Sulistiyani (2004 :77) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dipahami sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses memberi daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Ungkapan yang sama juga di kemukakan oleh Pranarka dalam Sulistiyani ( 2004 : 78 ) bahwa pemberdayaan mengandung dua makna yaitu : pertama *to give or authority* dimaknai sebagai pemberian kekuasaan, mengalihkan kekuasaan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Kedua *to give to or enable* dimaknai memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

Suharto (2010 : 58) mendefinisikan bahwa pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khusus kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan; menjangkau sumber – sumber produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatan, memperoleh barang – barang dan jasa yang diperlukan; serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dan

keputusan – keputusan yang mempengaruhi mereka. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Wrihatnolo (2007 : 75-76) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondidi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau dengan istilah lain, memberdayakan adalah kemampuan dan memandirikan masyarakat.

Mc.Ardle dalam Harry ( 2010 : 3 ) mengungkapkan bahwa pemberdayaan dan sebagai proses pengambilan keputusan olwh orang – orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan. Orang – orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pertolongan dari hubungan eksternal.

Dari defenisi yang diungkapkan oleh para ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kemampuan lapisan masyarakat yang kondisi tidak mampu sehingga terbebas dari jeruji kemiskinan sehingga dapat bebas dari ketergantungan dari pihak lain. Begitu juga pemberdayaan yang dilakukan dalam program keluarga harapan yang mana nantinya diharapkan keluarga penerima manfaat program keluarga harapan mampu keluar jari jeruji kemiskinan sehingga bisa hidup mandiri tanpa ketergantungan.

## 2.4.2 Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan secara umum adalah meningkatkan kemandirian individu/ masyarakat yang tidak berdaya menjadi individu/masyarakat yang berdaya dan bisa mandiri secara ekonomi tidak ketergantungan kepada pihak eksternal, terdapat beberapa pendapat ahli tentang hakikat pemberdayaan masyarakat.

Sulistiyani (2004 : 80) menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu masyarakat yang mandiri. Kemudian tersebut meliputi mandiri berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat yang dimaksud adalah kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah – masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri dari atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorif, afektif dengan penerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal tersebut.

Ungkapan yang sama kemudian di kemukakan oleh Kristiadi dalam Wrihatnolo (2007 : 117 ) mengungkapkan ujung tombak dari pemberdayaan masyarakat harus membuat masyarakat menjadi swadiri, mampu mengurus dirinya sendiri, swadana, mampu membiayai kebutuhan sendiri, dan swasebada, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri secara berkelanjutan.

Dengan dipaparkan tujuan tersebut maka esensi pemberdayaan masyarakat adalah terciptanya individu / masyarakat yang mandiri secara ekonomi, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari serta mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial.

### 2.4.3 Indikator Keberdayaan

Keberhasilan sebuah program pemberdayaan dapat dilihat dari indikator keberdayaan. Schuler dalam Suharto ( 2010 : 64 ) menyatakan, bahwa terdapat delapan indikator pemberdayaan yang disebut indek pemberdayaan yaitu :

1. Kebebasan mobilitas, seperti keluar rumah untuk kepasar, kepuskesmas dan lain – lain. Mobilitas tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
2. Kemampuan membeli komoditas kecil, yaitu membeli kebutuhan pokok. Individu dianggap mampu jika dapat mengambil keputusan sendiri dalam memenuhi kebutuhan, terutama jika menggunakan uang sendiri.
3. Kemampuan membeli komunitas besar, yaitu barang – barang sekunder dan tersier seperti televisi
4. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan rumah tangga
5. Kebebasan relative dari dominasi keluarga, misalnya melarang bekerja siluar rumah
6. Kesadaran hukum dan politik, seperti mengetahui nama presiden, anggota DPRD, serta mengetahui pentingnya surat niikah.
7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes – protes
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga, berupa memiliki rumah, tanah, asset produktif, dan tabungan.

Kemudian Fetterman dalam Mubarak ( 2010 : 58 ) menyatakan bahwa, terdapat 10 prinsip – prinsip dalam evaluasi pemberdayaan yaitu meliputi :

1. *Improvement* ( peningkatan )
2. *Community ownership* ( kepemilikan komunitas )
3. *Inclusion* ( inklusi )
4. *Democratic participation* ( partisipasi demokrasi )
5. *Social justice* ( keadilan social )
6. *Community knowledge* ( tingkat pengetahuan komunitas )
7. *Evidence – based strategies* ( strategi berbasis alasan )
8. *Capacity building* ( pengembangan kapasitas )
9. *Organization learning* ( pembelajaran organisasi )
10. *Accountability* ( akuntabilitas )

### 2.5.1 Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan sebuah konsep abstrak, yang dapat ditafsirkan secara berbeda tergantung dari perspektif siapa yang menilai. Cara pandang maupun pola pikir orang akan menentukan pemahaman tentang kondisi, sifat dan konteks kemiskinan, pada bagian ini peneliti akan memaparkan beberapa pandangan ahli tentang konsep ahli yang relevan dengan penelitian.

Sulistiyani (2004 : 27-28) menyatakan bahwa Kemiskinan merupakan kondisi yang jauh dari keadaan yang disebut sejahtera. Sejahtera merupakan kondisi dimana seseorang berada pada suatu kondisi telah mampu memenuhi kebutuhan diluar kebutuhan dasar.

Ungkapan yang sama juga dikemukakan oleh Sudarwati dalam Kartasasmita (2006 : 22 ) mendefinisikan bahwa kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pembangunan dan keterbelakanga kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Dengan perspektif yang lebih luas lagi, Badan Pusat Statistik (BPS) adalah mendefenisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran perkapita selama sebulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan standar minimum. Kebutuhan standard minimum digambarkan dengan garis kemiskinan (GK) yaitu batas minimum pengeluaran perkapita perbulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan.

Tjokrowinoto dalam Sulistiyani (2004:27) yang mendefinisikan bahwa : Kemiskinan tidak hanya menyangkut masalah kesejahteraan (*welfare*) semata, tetapi kemiskinan menyangkut persoalan kerentanan (*vulnerability*), ketidak berdayaan (*powerless*), tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja, menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk konsumsi, angka ketergantungan tinggi, rendahnya akses terhadap pasar, dan kemiskinan terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto dalam Suyanto ( 1995 : 55 ) kemiskinan adalah suatu ketidakberdayaan. Dijelaskan kemudian, orang – orang yang terkena musibah ini tidak akan banyak berdaya, jangankan untuk mengembangkan diri ( jasmani maupun rohani , untuk bertahan menegakkan

hidup hidup fisiknya pada tarafnya yang subsisten saja terkadang si orang ini tidak cukup berkemampuan. Kian miskin dan kian diperkemiskinkan hidup seseorang, akan kian rendah dan menurun pulalah tingkat keberdayaan itu.

Dari berbagai konsep yang dipaparkan oleh para ahli tersebut dapat penulis ambil kesimpulan bahwa kemiskinan merupakan dimana sebuah kondisi seseorang atau suatu keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari bahkan keadaan dimana seseorang atau sebuah keluarga penghasilan sehari-hari dihabiskan untuk hari itu juga dan bahkan tidak berdaya dalam hal jasmani maupun rohani.

#### **2.5.2 Jenis - Jenis Kemiskinan**

Kemiskinan adalah gejala penurunan kemampuan seseorang atau sekelompok orang atau wilayah sehingga mempengaruhi daya dukung hidup seseorang atau sekelompok orang tersebut, dimana pada suatu titik waktu secara nyata mereka tidak mampu mencapai kehidupan yang layak (Mencher dalam Siagian, 2012:5). Salah satu konsekuensi logis dari upaya mengidentifikasi kemiskinan adalah bahwa kita akan menemukan dan membahas tentang jenis-jenis kemiskinan. Tidak mudah membahas dan mengemukakan jenis-jenis kemiskinan. Ada beberapa jenis-jenis kemiskinan yang akan diuraikan yaitu :

- 1) Kemiskinan absolut yaitu suatu kondisi, dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga orang tersebut memiliki taraf kehidupan yang rendah, dianggap tidak layak atau tidak sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia.

- 2) Kemiskinan relatif yaitu kemiskinan yang didasari pada komparasi kondisi kehidupan antara seseorang dengan orang lain. Analisis komparatif tentang kondisi hidup manusia dilakukan karena kondisi taraf hidupdisuatu lingkungan berbeda dengan lingkungan yang lainnya.
- 3) Kemiskinan massa yaitu kemiskinan yang dialami secara massal penduduk dalam suatu lingkungan wilayah.
- 4) Kemiskinan non massa yaitu kemiskinan yang dihadapi oleh segelintir orang dalam suatu wilayah.
- 5) Kemiskinan alamiah yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai konsekwensi dari kondisi alam yang tidak memenuhi dimana seseorang atau sekelompok orang tersebut bermukim.
- 6) Kemiskinan kultural yaitu kemiskinan yang disebabkan karena budaya dimana masyarakat banyak yang tidak menyadari bahwa mereka miskin.
- 7) Kemiskinan terinvolusi yaitu seseorang yang mengetahui bahwa diamiskin, namun sekelompok orang tersebut menganggap kemiskinan itu merupakan hal yang wajar dan bukanlah masalah yang esensial.
- 8) Kemiskinan struktural yaitu mendeskripsikan bahwa struktur social masyarakat itu berbeda, sehingga menghambat masyarakat untuk mengembangkan kemampuan hidupnya.
- 9) Kemiskinan situasional yaitu kondisi kehidupan yang tidak layak yang disebabkan oleh situasi yang ada, maksud dari kondisi situasi yang ada

adalah bahwa kondisi situasi itu tidak kondusif bagi masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

- 10) Kemiskinan buatan yaitu terjadi karena kelembagaan yang ada mengakibatkan anggota dalam kelompok tidak menguasai sarana ekonomi yang ada secara merata.

Dari paparan jenis – jenis kemiskinan tersebut dapat disimpulkan bahwa kemiskinan tidak hanya kekurangan dalam hal hal yang pokok seperti sandang, pangan dan papan, akan tetapi kemiskinan bisa disebabkan oleh lingkungan, kemudian dihubungkan dengan program keluarga harapan yang sasarannya kemiskinan absolut akan tetapi terkhusus di kecamatan langgam kabupaten pelalawan yang mendapat bantuan sosial tersebut adalah rata – rata kemiskinan relatif.

Ungkapan yang sama juga di kemukakan oleh Sayogyo dalam Suyanto ( 1995 : 4 ) membedakan tiga tipe orang miskin, yakni miskin ( *poor*), sangat miskin ( *very poor*), dan termiskin ( *poorest*). Penggolongan ini dikemukakan berdasarkan pendapat orang setiap tahunnya. Orang miskin adalah orang yang berpenghasilan kalau diwujudkan dalam bentuk beras yakni 320 kg/orang/tahun. Jumlah tersebut dianggap cukup memenuhi kebutuhan makan minum (1990 kaori/orang/hari dan 40 gr protein/orang/hari). Orang yang sangat miskin berpenghasilan antara 240 kg, 320 kg beras/orang/tahun. Dan orang yang digolongkan termiskin berpenghasilan berkisar antara 180 kg 240 kg beras/orang/tahun.

Todaro (2008 : 203) menyatakan bahwa kemiskinan dapat dibedakan menurut sifatnya yang terdiri atas : kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Konsep kemiskinan absolut adalah jumlah masyarakat yang hidup di bawah tingkat penghasilan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan kemiskinn relatif adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat yang meskipun tingkat pendapatannya sudah mampu mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum tetapi masih tetap jauh lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya (Esmara dalam Ainul Hayati, 2012 : 23)

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Sach dalam Ainul Hayati (2012:24) membedakan kemiskinan dalam tiga kategori yaitu kemiskinan ekstrim (absolut), kemiskinan moderat dan kemiskinan relatif. Kemiskinan estrim adalah situasi rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar danlamm mempertahankan kan kelangsungan hidup. Rumah tangga yang mengalami kemiskinan ekstrim berada dalam situasi kelaparan kronis, tidak mampu mengakses sarana kesehatan, tidak memiliki sumber air minum bersih dan sanitasi yang baik, tidak mampu menyekolakan anaknya, dan mungkin kekurangan tempat perlindungan dasar. Kemiskinan moderat menuju pada kondisi rumah tangga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar namun hanya untuk kebutuhan dasar saja. Sedangkan kemiskinan relative di Negara berpendapatan tinggi, tidak memiliki akses terhadap benda – benda budaya, hiburan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan berkualitas, pendidikan dan keuntungan lain bagi kelompok social atas

mempertimbangkan kemiskinan sebagai ketidak mampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat juga mengara pada konsep kemiskinan relatif.

### 2.5.3 Variabel Kemiskinan

Sulistiyani (2004: 34) menyatakan bahwa terdapat berbagai variabel dalam menentukan tingkat kemiskinan. Misalnya BPS dengan indikator kebutuhan kalori 2.100 kalori perkapita perhari, Bank Dunia dengan indikator 2.200 kalori perorang perhari. Namun menurut Wrihatnolo (2007: 159) setelah melalui kajian mendalam berdasarkan uji statistik hasil survei BPS, disimpulkan bahwa hubungan antara 14 variabel kemiskinan dan kemampuan memenuhi kebutuhan kalori dan kebutuhan dasar non-makanan sangat paling representative menjelaskan garis kemiskinan di Indonesia.

Wrihatnolo (2007: 158) mengemukakan bahwa terdapat dua unit analisis untuk mendata rumah tangga miskin, yaitu unit wilayah dalam bentuk satuan lingkungan setempat (SLS) berupa Rukun Tetangga atau sejenisnya, serta unit rumah tangga yang ditentukan berdasarkan 14 variabel inti berikut ini :

- a. Luas lantai per anggota rumah tangga/keluarga kurang dari 8 meter persegi,
- b. Jenis lantai rumah berupa tanah/papan dengan kualitas rendah,
- c. Jenis dinding rumah berupa bamboo atau papan dengan kualitas rendah,
- d. Fasilitas buang air besar belum ada,
- e. Sumber air minum bukan air bersih,
- f. Penerangan yang digunakan bukan listrik,

- g. Bahan bakar yang digunakan kayu/arang,
- h. Frekuensi makan dalam sehari kurang dari 2 kali,
- i. Tidak memiliki kemampuan membeli daging/susu/ayam dalam seminggu,
- j. Tidak memiliki kemampuan membeli baju baru setiap anggota rumahtangga,
- k. Tidak memiliki kemampuan berobat dipuskesmas/poliklinik,
- l. Lapangan pekerjaan berupa petani gurem, nelayan atau pekebun,
- m. Pendidikan kepala rumah tangga tidak tamat SD atau belum sekolah,
- n. Tidak memiliki asset/barang berharga minimal Rp.500.000.

#### 2.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rokhoul Alamin.UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2010. “ *Analisis Peran Pendamping dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Suku Dinas Sosial Jakarta Utara*”. Hasil menunjukkan bahwasanya program keluarga harapan memiliki kesesuaian antara harapan pendamping sosial ( Pemerintah ) dengan harapan masyarakat setempat yang dijadikan objek pelaksanaan Program Keluarga Harapan dan upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pendamping PKH berjalan wajar dan semaksimal mungkin, dalam artian semaksimal mungkin yang dapat dilakukan oleh pendamping PKH.

Adapun yang membedakan dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada fokus penelitiannya, penelitian di atas fokus penelitiannya terhadap Peran Pendamping dalam program keluarga harapan Sedangkan

penelitian yang penulis lakukan fokus terhadap evaluasi-evaluasi yang dilakukam dalam kegiatan program keluarga harapan di kecamatan Bandar Seikijang kabupaten pelalawan sebagai mana yang ditetapkan dalam Permensos no 01 tentang program keluarga harapan pada Bab V mekanisme pelaksanaan program keluarga harapan serta apasaja faktor pendukung dan penghambat Kegiatan program keluarga harapan di kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawaan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurfahira Syamsir. Universitas Hasanudin. 2014 “ *Implementasi Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Tamalate berjalan dengan baik, karena pelaksanaannya selalu dikawal oleh pendamping yang direkrut oleh pemerintah pusat.

Adapun yang membedakan dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada fokus penelitiannya, penelitian di atas fokus penelitiannya terhadap Implementasi program keluarga harapan dibidang Pendidikan Sedangkan penelitian yang penulis

lakukan fokus terhadap kepada menilai tingkat kerja atau evaluasi program keluarga harapan di kecamatan Bandar Seikijang kabupaten pelalawan sebagai mana yang ditetapkan dalam Permensos no 01 tentang program keluarga harapan pada Bab V mekanisme pelaksanaan program keluarga harapan yang dilaksanakan dengan tahapan 1. Perencanaan, 2. Penetapan Calon Peserta PKH, 3. Validasi data calon penerima manfaat PKH, 4.Penetapan keluarga penerima manfaat PKH 5. Penyaluran Bansos

PKH, 6. Pendampingan PKH, 7. Peningkatan Kemampuan keluarga  
8. Verifikasi komitmen keluarga Penerima manfaat PKH dan 10.  
Trasformasi Kepesertaan PKH serta apa saja faktor pendukung dan  
penghambat kegiatan program keluarga harapan di kecamatan Bandar  
Seikijang Kabupaten Pelalawaan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rama Hendratno. Universitas Indonesia. 2010.  
*“Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Cakupan Imunisasi,  
Pemeriksaan Kehamilan, Angka Partisipasi Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan  
Tingkat Pertama, dan Konsumsi Rumah Tangga.* Hasil penelitaian menunjukkan  
hasil estimasi bahwa dampak PKH terhadap Penambahan jumlah cakupan  
imunisasi setelah kurun waktu dua tahun sebesar 0,75 kali dibandingkan rumah  
control.

Ada pun yang membedakan dengan penelitian yang saya lakukan terletak  
pada fokus penelitiannya, tehnik metodologi, serta pengaruh dampak Program  
keluarga harapan terhadap Cakupan Imunisasi, Pemeriksaan Kehamilan, Angka  
Partisipasi Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan Konsumsi  
Rumah Tangga, sedangkan penelitian penulis berfokus pada evaluasi yang di  
lakukan dalam program keluarga harapan.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Keterangan	Ahmad Rokhoul Alamin	Nurfahira Syamsir	Rama Hendratno
1	Judul	Analisis Peran Pendamping dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Suku Dinas Sosial Jakarta Utara	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar	Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Cakupan Imunisasi, Pemeriksaan Kehamilan, Angka Partisipasi Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan Konsumsi Rumah Tangga
2	Teori	Peran, Pekerja Sosial,	Implementasi Kebijakan, Model – model kebijakan, Unsur-unsur Implementasi	Evaluasi dampak, evaluasi
3	Masalah	Kemiskinan dan kebodohan menjadikan Indonesia Negara yang sedang mencari berbagai solusi bagu gerbang pencerahan	Lapisan Masyarakat menengah kebawah banyak yang tidak dapat mengenyam pendidikan, hal ini disebabkan oleh tidak adanya biaya untuk mengakses pendidikan	Agar manfaat PKH dapat dirasakan RTSM lain yang belum mendapatkan bantuan sosial PKH
4	Tujuan	Untuk mengetahui Peran Pendamping dalam program program pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH).	Untuk mendiskripsikan bagaimana proses implementasi PKH dan untuk isi kebijakan dalam implementasi PKH di bidang Pendidikan	Untuk mengetahui Jumlah dan persentase cakupan imunisasi anak – anak 0-3 tahun
5	Metode	Deskriptif – Kualitatif	Deskriptif – Kualitatif	Kuantitatif
6	Hasil	Hasil menunjukkan	Hasil penelitian	Hasil penelitaian

	<p>bahwasanya program keluarga harapan memiliki kesesuaian antara harapan pendamping sosial ( Pemerintah ) dengan harapan masyarakat setempat yang dijadikan objek pelaksanaan Program Keluarga Harapan dan upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pendamping PKH berjalan sewajar dan semaksimal mungkin, dalam artian semaksimal mungkin yang dapat dilakukan oleh pendamping PKH.</p>	<p>menunjukkan bahwa Implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Tamalate berjalan dengan baik, karena pelaksanaannya selalu dikawal oleh pendamping yang direkrut oleh pemerintah pusat.</p>	<p>meunjukkan hasil estimasi bahwa dampak PKH terhadap Penambahan jumlah cakupan imunisasi setelah kurun waktu dua tahun sebesar 0,75 kali dibandingkan rumah control.</p>
--	--	--	--

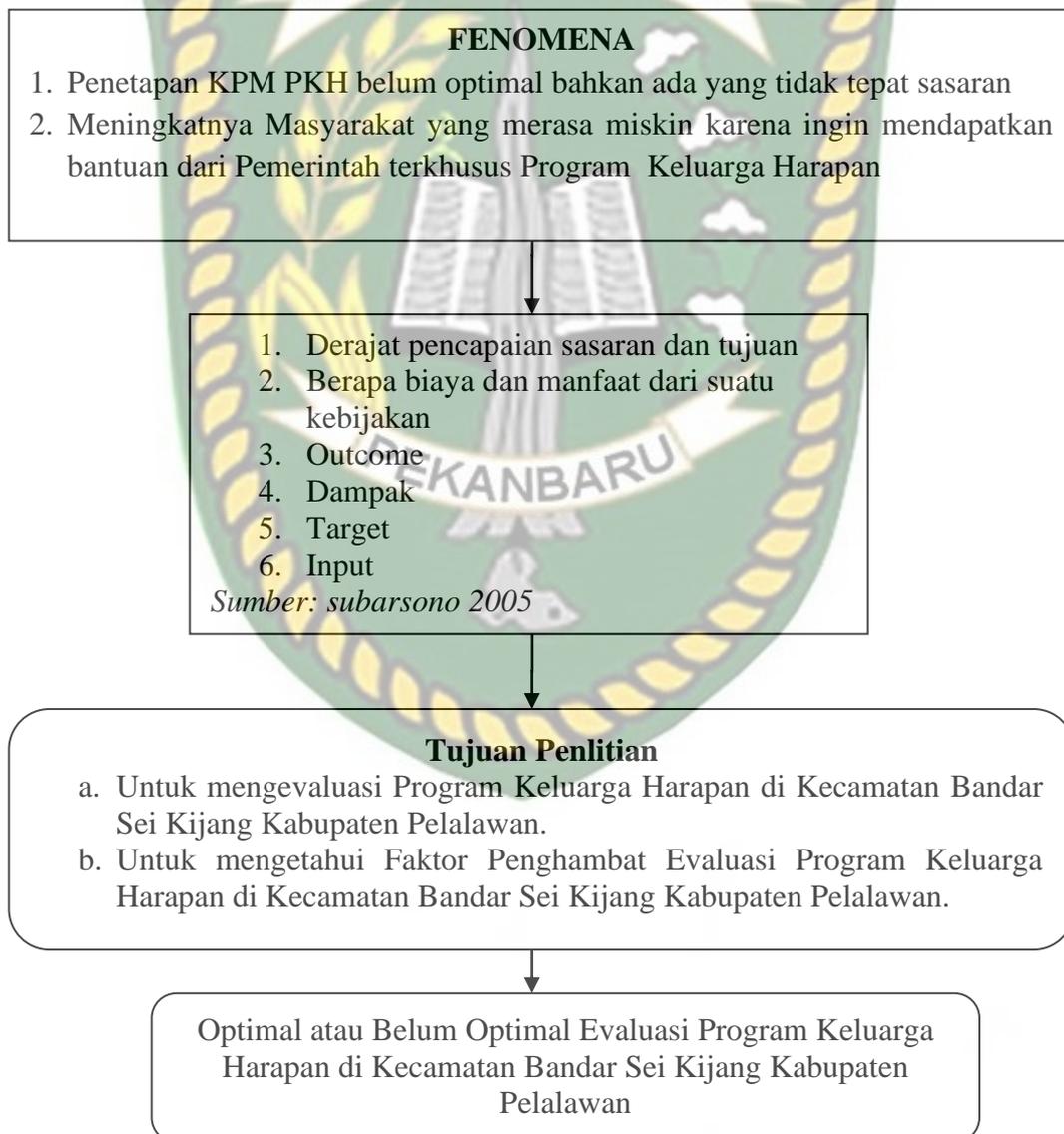
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## 2.7 Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, menurut fenomena yang terjadi dilapangan mengenai “Evaluasi program keluarga harapan dalam penanggulangan kemiskinan dikecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan” menggunakan teori dalam buku Kebijakan Publik Subarsono, (2005) menjelaskan tujuan dan sasaran program, peneliti memilih teori ini sebagai kerangka berpikir dikarenakan sesuai dengan fenomena yang ada di lapangan

**Gambar 2.1 Kerangka berpikir**



Sumber, Modifikasi penulis, 2019

### 2.7.1 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah batasan atau rincian-rincian kegiatan operasional yang diperlukan dan membatasi operasional penelitian. Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah yang digunakan serta memudahkan pemahaman, maka dioperasionalkan beberapa konsep yang dipakai penulis sebagai berikut :

1. Evaluasi adalah penulian dengan merid proses terhadap program pemerintahan evaluasi kebijakan memusatkan perhatiannya pada estimasi, penilain dan taksiran terhadap implementasi (proses) dan akibat-akibat (dampak) kebijakan. Selain itu juga evaluasi adalah suatu metode analisis kebijakan yang digunakan untuk menghasilkan informasi mengenai implementasi program tepat sasaran, implementasi tepat waktu atau harga dari arah yang telah lalu dan yang akan datang.
2. Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar dan rentan akan kesenjangan sosial.
3. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kemampuan lapisan masyarakat yang kondisi tidak mampu sehingga terbebas dari jeruji kemiskinan sehingga dapat bebas dari ketergantungan dari pihak lain.
4. Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, dengan menggunakan analisis data yang utama adalah observasi, teknik penunjang studi wawancara dan dokumentasi. Menurut Arikunto (2010:3), Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

Metode deskriptif-Kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan dan memaparkan bagaimana Evaluasi Program Keluarga Harapan dalam Penanggulangan Kemiskinan Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, serta apa – apa saja factor penghambat Program Keluarga Harapan dalam bentuk kata – kata tertulis atau lisan dari informan yang diteliti selanjutnya diorganisir dan dianalisis untuk mendapatkan gambaran terkait dengan sasaran peneliti.

#### 3.2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap pertama berjumlah 405 KPM, tahap kedua 389 KPM, tahap ketiga 388 KPM dan tahap keempat berjumlah 383 KPM.

Adapun penentuan lokasi penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pihak UPPKH Kecamatan Bandar Sei Kijang mendukung penelitian dengan bersedia menyediakan data – data yang dibutuhkan.
2. Kecamatan Bandar Sei Kijang terdiri dari satu Kelurahan dan empat Desa.
3. Belum adanya penelitian yang meneliti tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.

### 3.3. Informan Penelitian

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dimana peneliti memilih *informan* yang peneliti anggap mengetahui tentang permasalahan penelitian.

Adapun yang menjadi *informan* yang akan memberikan informasi guna mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

1. Wazarman, SE Sebagai Camat Bandar Sei Kijang
2. Budi Hartoyo,S.H sebagai Kasi Kesejahteraan Sosial di Pemerintah Kecamatan Bandar Seikijang, Tim Koordinasi UPPKH Kecamatan Bandar Sei Kijang
3. Akmal Yakin,S.H sebagai Pegawai Pelaksana PKH , menjabat sebagai Koordinator Kecamatan UPPKH Kecamatan Bandar Sei Kijang
4. Vivin wulandari,M.Pd sebagai Pegawai Pelaksana PKH, jabatan sebagai Pendamping Sosial UPPKH kecamatan Bandar Sei Kijang

5. Rusmi Wati sebagai Ketua kelompok Keluarga Penerima Manfaat Bansos PKH
6. Asma sebagai Keluarga Penerima manfaat Bansos PKH Komponen Reguler
7. Maryam sebagai Keluarga Penerima Manfaat Bansos PKH Komponen Kesejahteraan sosial ( Lansia )

Adapun yang peneliti jadikan sebagai *Informan* adalah *Subjek* ataupun individu, yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini, ciri-cirinya antara lain:

1. Berada didaerah yang diteliti
2. Mengetahui tentang Program Keluarga Harapan
3. Bisa berargumentasi dengan baik
4. Merasakan dampak dari Program Keluarga Harapan
5. Terlibat Langsung dengan Permasalahan

### 3.4. Jenis Data dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama misalnya individu atau perseorangan seperti, hasil wawancara, pengisian kuesioner, atau bukti transaksi ( Husein Umar : 2004 : 64 ) . Data primer ini diperoleh dari :

- a. Melakukan wawancara dengan informan penelitian yang terkait dengan Program Keluarga Harapan.
- b. Melalui observasi lapangan yang dilakukan pada perilaku Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.

- c. Hasil Dokumentasi penelitian berupa foto-foto pelaksanaan penelitian tentang Evaluasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini :

1. Buku Panduan Bimtek Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial RI
2. Buku kerja Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan
3. Buku Pedoman Umum Program Keluarga Harapan Tahun 2016
4. Petunjuk Teknis Penyaluran Bansos NON Tunai Program Keluarga Harapan
5. Monografi Kecamatan Bandar Seikijang

**3.5. Teknik Pengumpulan Data**

a. Observasi (pengamatan)

Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung dengan objek penelitian guna mendapatkan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian. Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013 : 166) Observasi adalah proses – proses pengamatan dan ingatan. Observasi ini dilakukan di Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan baik instansi yang berkaitan dengan keluarga penerima manfaat (Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan, Kantor Camat Bandar Sei Kijang, Pendamping Sosial, Bank Mandiri maupun Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan. Adapun jenis observasi yang

peneliti gunakan adalah observasi terus terang atau tersamar yaitu dengan diketahui oleh informan bahwa peneliti sedang melakukan penelitian.

Hal – hal yang di observasi Peneliti sebagai berikut :

1. Observasi dimulai dari tahap memasuki situasi sosial kemudian dilanjutkan dengan tahap menentukan fokus sampai kepada mengurai fokus menjadi komponen yang lebih rinci
  2. Mengamati Perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan
  3. Mengamati Sarana dan Prasarana untuk menunjang Pelaksanaan Evaluasi Program Keluarga Harapan terkhusus di Kecamatan Bandar Sei Kijang
- b. Wawancara

Cara ini digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan informan secara mendalam yang dianggap mengerti tentang Evaluasi Program Keluarga Harapan yang sedang diteliti. Wawancara akan dilakukan dengan Camat Bandar Sei Kijang, Kasi Kesejahteraan Sosial di Pemerintah Kecamatan Bandar Sei Kijang, Korcam UPPKH Kecamatan Bandar Sei Kijang, Pendamping Sosial PKH Kecamatan Bandar Sei Kijang, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan orang-orang tertentu yang terkait dengan penelitian. Menurut Sudjanah dalam Djam'an Satori ( 2014 : 130 ) Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya ( *interviewer* ) dengan pihak yang ditanya atau penjawab ( *interviewee* ).

Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak berstruktur sehingga pertanyaan yang diajukan akan berkembang sesuai kebutuhan informasi yang ingin didapatkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai catatan-catatan, dokumen-dokumen, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah-majalah, notulen rapat atau agenda-agenda. Data-data tersebut diharapkan mampu memperkaya teori, pendapat serta pemikiran terkait dengan dampak Program Keluarga Harapan dalam Penanggulangan Kemiskinan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

### 3.6. Analisa Data

Analisa merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang ada. Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa Kualitatif deskriptif data yang dikemukakan oleh Miles dan Hubermas dalam Emzir (2010:169). Berikut ini adalah beberapa tahapan yang dipakai untuk mengalisis data :

a. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian "data mentah" yang terjadi dalam catatan – catatan lapangan tertulis.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang tepat, dan dapat membantu peneliti dalam

pengumpulan data. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan difokuskan pada Analisa Evaluasi pada Evaluasi kegiatan Program Keluarga Harapan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.

b. Model Data / Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang didapat di lapangan disajikan ke dalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak disesuaikan dengan fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar keadaan yang sebenarnya di lapangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat terkait Analisis evaluasi pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Harapan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan. Semua data mengacu pada informasi atau data yang diperoleh selama penelitian berlangsung di lapangan.

c. Penarikan atau verifikasi Kesimpulan

Setelah semua data yang berkenaan dengan Analisis pelaksanaan evaluasi Program Keluarga Harapan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan. dan faktor-faktor penghambat didapat, serta mengaitkan dengan teori, maka ditarik kesimpulan yang bersifat sempurna. Data yang diperoleh juga dapat dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan dengan penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

### 3.7 Jadwal Kegiatan penelitian

Jadwal waktu kegiatan penelitian bertujuan agar tersusunnya secara jelas kegiatan yang akan dilakukan oleh penulis. Berikut dapat dilihat tabel 3.1 terkait jadwal penelitian yang telah disusun sebagai berikut :

**Tabel 3.1 : Evaluasi Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan kemiskinan Dikecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan minggu ke-																			
		Agustus				september				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP	■	■	■	■																
2	Seminar UP					■	■	■	■												
3	Riset									■	■	■	■								
4	Penelitian lapangan													■	■	■	■				
5	Pengelolaan dan Analisis Data																	■	■	■	■
6	Konsultasi Bimbingan Tesis																	■	■	■	■
7	Ujian Tesis																			■	■
8	Revisi Tesis																			■	■
9	Pengadaan serta penyerahan tesis																			■	■

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN BANDAR SEI KIJANG KABUPATEN PELALAWAN

#### 4.1. Gambaran umum Kecamatan Bandar Sei Kijang

Kecamatan Bandar Sei Kijang terletak lebih kurang 35 Km dari pusat Ibukota Propinsi dan lebih kurang 40 Km dari pusat Ibukota Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Bandar Sei Kijang dibentuk berdasarkan perda Nomor 06 Tahun 2005. Adapun Kecamatan Bandar Sei Kijang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : siak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kec. Langgam dan Kab. Kampar
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kota pekanbaru dan Kab. Siak
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kec. Pangkalan Kerinci

Tediri dari 5 desa atau kelurahan. Jumlah penduduk 16.914 jiwa dan luas wilayah 320,8 Km<sup>2</sup>.

**Tabel. 4.1 Nama Kelurahan/Desa di Kecamatan Bandar Sei Kijang**

No	Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa
1	Bandar Sei Kijang	Sekijang
		Simpang Beringin
		Muda Setia
		Lubuk Ogung
		Kiyab Jaya
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>

*Sumber Data : Monografi Kecamatan Bandar Sei Kijang Tahun 2018*

## 4.2. Gambaran Umum Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (Permensos No 01 Tahun 2018) :

- a. Memiliki komponen kesehatan yakni anak dengan usia di bawah 6 tahun, ibu hamil/menyusui, termasuk anak penyandang disabilitas ringan/ sedang.
- b. Memiliki komponen pendidikan anak usia sekolah 6 hingga 21 tahun untuk peserta pendidikan SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat dan/atau SMA/MA sederajat, termasuk Anak penyandang disabilitas ringan/ sedang.
- c. Memiliki komponen kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas Berat di dalam keluarga peserta PKH. Penyandang Disabilitas Berat adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan/atau sepanjang hidupnya pada bantuan/pertolongan orang lain, tidak mampu menghidupi diri sendiri, serta tidak dapat berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan lainnya (Sumber: Pedoman Pelaksanaan Pemberian Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat, 2015)
- d. Memiliki komponen kesejahteraan sosial untuk lanjut usia 60 tahun ke atas di dalam keluarga peserta PKH

### 4.2.1. Dasar Hukum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Menurut Pedoman Umum PKH 2016 Secara teknis, kegiatan Program Keluarga Harapan melibatkan kementerian dan lembaga, yaitu: Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Tenaga Kerja

dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPS, TNP2K dan Pemerintah Daerah. Sumber dana PKH berasal dari APBN. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya PKH dijalankan berdasar peraturan dibawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86)
10. Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Rumah Tangga Sangat Miskin Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga. (Sumber : Pedoman Umum PKH 2016)

#### **4.2.2. Tujuan Program Keluarga Harapan**

Secara umum Program Keluarga Harapan memiliki tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan

kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga penerima manfaat dan program keluarga harapan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Sedangkan secara khusus tujuan Program Keluarga Harapan (Permensos nomor 01 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 2) adalah :

- a. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
- e. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat

#### **4.2.3. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan**

##### **a. Hak KPM Program Keluarga Harapan**

1. Mendapatkan bantuan uang tunai yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan program.
2. Mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh anggota keluarga.
3. Terdaftar dan mendapatkan program-program komplementaritas dan sinergitas penanggulangan kemiskinan lainnya. (Pedoman Umum PKH 2016 )

##### **b. Kewajiban KPM Program Keluarga Harapan**

Seluruh anggota keluarga peserta PKH memiliki kewajiban memenuhi komitmen berdasarkan kriteria komponen masing-masing sebagai berikut :

1. Kewajiban Komponen Kesehatan

- a. Peserta PKH wajib memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan
  - b. Peserta PKH yang dikenakan persyaratan kesehatan adalah peserta yang memiliki ibu hamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD
2. Kewajiban Komponen Pendidikan
- Peserta PKH yang memiliki anak usia 6-21 tahun diwajibkan untuk didaftarkan/terdaftar pada lembaga pendidikan dasar (SD/ MI /SDLB /Salafiyah Ula / Paket A , SMP/MTs/SMLB/ Salafiyah Wustha/Paket B termasuk SMP/MTs terbuka, atau SMA/MA/Paket C termasuk SMA/MA terbuka) dan kehadiran minimal 85% dari hari belajar efektif setiap bulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan verifikasi bidang pendidikan
3. Kewajiban Komponen Kesejahteraan Sosial
- a. Penyandang disabilitas berat melakukan pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan. Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan ke rumah (home care)
  - b. Lansia melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai kebutuhan. Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia). Lansia harus dipastikan mengikuti kegiatan sosial di fasilitas pelayanan kesejahteraan sosial melalui kegiatan day care dan mengikuti berbagai kegiatan yang dibutuhkan. Lansia yang mengalami kesulitan mengikuti day care dapat mengikuti kegiatan home care dengan pendamping lansia mendatangi ke rumah. (Pedoman Umum PKH 2016 )

#### **4.2.4. Sanksi KeluargaPenerima Manfaat Program Keluarga Harapan**

Sanksi dalam hal penangguhan dan pembatalan diberlakukan apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dengan ketentuan :

- a. Tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan protokol yang berlaku di setiap fasilitas layanan secara rutin setiap bulannya berupa pengurangan nominal bantuan sebesar 10% pada setiap tahapan penyaluran bantuan.
- b. Jika tiga bulan berturut-turut seluruh anggota keluarga peserta PKH tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan dan/atau pendidikan sesuai dengan protokol yang berlaku di setiap fasilitas layanan maka pengurangan nominal bantuan sebesar 100% atau tidak mendapatkan bantuan akan tetapi masih menjadi peserta PKH.
- c. Jika enam bulan berturut-turut seluruh anggota keluarga peserta PKH tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan protokol yang berlaku di setiap fasilitas layanan, maka akan dikeluarkan dari kepesertaan PKH secara permanen meskipun masih memenuhi kriteria PKH.
- d. Khusus bagi daerah pengembangan yang infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial belum memadai maka penerapan sanksi akan dilakukan secara bertahap.
- e. Jika dalam tiga kali siklus penyaluran bantuan berturut-turut atau selama sembilan bulan peserta PKH tidak mengambil bantuan, maka dikeluarkan dari kepesertaan PKH
- f. KM terbukti tidak memenuhi kriteria sebagai peserta PKH, maka dikeluarkan dari kepesertaan PKH
- g. Peserta PKH yang telah dikeluarkan kepesertaannya, tidak dapat diajukan kembali sebagai Peserta PKH. (Pedoman Umum PKH 2016 )

#### **4.2.5. Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan**

Penyaluran bantuan diberikan kepada peserta PKH berdasarkan komponen kepesertaan PKH. Penyaluran bantuan bagi peserta yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya dilaksanakan empat tahap dalam satu tahun, sedangkan untuk kepesertaan yang ditetapkan pada tahun berjalan, penyalurannya

dilaksanakan dalam satu tahap. Penyaluran bantuan PKH dilakukan tunai dan non tunai oleh lembaga bayar.

Bantuan PKH diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bantuan tetap diberikan per tahun
2. Bantuan diberikan kepada penerima manfaat maksimal tiga anggota keluarga yang memenuhi kriteria kepesertaan PKH
3. Jika dalam satu keluarga terdapat lebih dari tiga anggota keluarga yang memenuhi kriteria kepesertaan PKH, maka bantuan diberikan berdasarkan nilai nominal bantuan terbesar
4. Kehamilan keempat dan berikutnya tidak dihitung sebagai komponen penerima bantuan

Jadwal dan pelaksanaan penyaluran bantuan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada tahun berjalan serta disesuaikan dengan kebijakan yang dibuat untuk memperlancar pelaksanaan penyaluran bantuan.

**Tabel 4.2. Ketentuan Indeks dan Komponen Bantuan PKH**

No	Komponen Bantuan	Indeks Bantuan (Rp/tahun/KPM)
1	KPM Reguler	Rp.1.890.000,-
2	KPM Lanjut Usia	Rp.1.890.000,-
3	KPM Penyandang Disabilitas	Rp.2.000.000,-
4	KPM di Papua dan Papua Barat	Rp.2.000.000,-

Sumber : SK Menteri Sosial RI, 2017

#### **4.2.6. Kelembagaan Program Keluarga Harapan**

##### **a. Kelembagaan Tingkat Pusat**

Menurut Pedoman Umum PKH 2016, Kelembagaan ditingkat Pusat terdiri dari Tim Pengendali yang diketuai oleh Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat; Tim Pengarah Pusat terdiri dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, BPS dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Tim Koordinasi Teknis Pusat yang terdiri dari pejabat aselon II atau aselon III yang ditunjuk Tim Pengarah Pusat; dan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH Pusat)

yang merupakan pelaksana program dibawah kendali Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial.

**Gambar 4.1. Kelembagaan PKH Tingkat Pusat – Tingkat Kecamatan**



*Sumber: Pendum PKH 2013*

#### b. Kelembagaan Tingkat Daerah

Terdiri dari Tim Koordinasi PKH Provinsi, Tim Koordinasi PKH Kabupaten/Kota, dan UPPKH Kabupaten/Kota. Tim Koordinasi PKH Propinsi terdiri dari Gubernur sebagai pembina, Sekretaris Daerah ketua tim pengarah, kepala Bappeda Provinsi ketua tim teknis, kepala Dinas Sosial Provinsi sebagai sekretaris, dan anggota meliputi kepala dinas Pendidikan, Kesehatan, kepala BPS, kepala kantor wilayah Agama, dan kepala instansi lain yang dianggap perlu. Tugas dan tanggungjawab Tim Koordinasi PKH Provinsi secara umum meliputi koordinasi persiapan Provinsi untuk mendukung pelaksanaan PKH, dan koordinasi rutin terhadap partisipasi Provinsi dan Kabupaten/kota terkait pelaksanaan PKH. Tim Koordinasi PKH Kabupaten/Kota meliputi Bupati sebagai

Pembina, Sekertaris Daerah sebagai ketua tim pengarah, Bappeda sebagai ketua tim teknis, Kepala Dinas Sosial sebagai sekretaris, dan anggota yang terdiri dari kepala dinas Pendidikan, Kesehatan, BPS, Koordinator UPPKH Kabupaten, Camat Lokasi PKH serta instansi lain yang dianggap perlu.

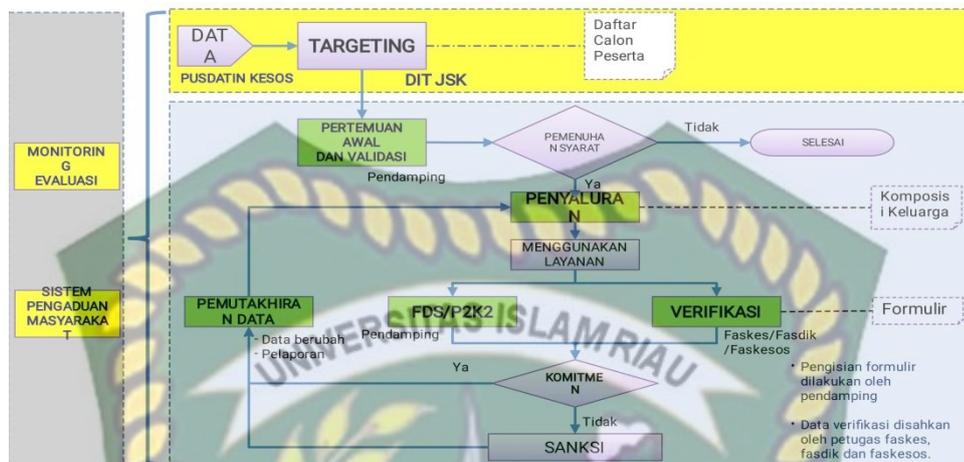
Unit Pelaksana PKH (UPPKH) Kabupaten terdiri dari unsur Dinas Sosial Kabupaten/Kota, serta tenaga Operator yang direkrut oleh Kementerian Sosial dan ditempatkan di sekretariat UPPKH Kabupaten/Kota. Sedangkan UPPKH Kecamatan merupakan pelaksana PKH pada tingkatan terbawah pada pelaksana PKH. Keanggotaan UPPKH Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, Kasi Kesejahteraan Masyarakat, Kepala UPTD Pendidikan, Kepala UPTD Kesehatan, BPS, Pendamping PKH dan kepala-kepala Kampung.

#### **4.2.7. Kegiatan Program Keluarga Harapan**

Kegiatan PKH merupakan tahapan pelaksanaan PKH yang meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh seluruh komponen PKH dari awal ditetapkan suatu lokasi PKH sampai dengan berakhirnya program PKH. Berdasarkan panduan umum, kegiatan PKH meliputi sebagai berikut :

- a. Penetapan Sasaran (*targeting*)
- b. Pertemuan Awal dan Validasi
- c. Pembentukan Kelompok KSM
- d. Penyaluran Bantuan
- e. Verifikasi Komitmen
- f. Pemutahiran Data KSM

**Gambar 4.2. Kegiatan Program Keluarga Harapan**



Sumber : UPPKH Pusat

Untuk mendukung terlaksananya siklus tersebut, maka dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut;

1. Koordinasi dan Sosialisasi,
2. Rekrutmen, dan Pelatihan,
3. Rapat koordinasi tingkat pusat, propinsi, dan Kabupaten/kota,
4. Bimbingan teknis pendamping dan operator (reguler) serta penyedia layanan (*service provider*)
5. Pengaduan masyarakat,
6. Monitoring dan evaluasi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) – *FamilyDevelopment Sesion (FDS)*

#### 4.2.8. Pendamping Sosial

Pendamping Sosial adalah seseorang yang direkrut dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI untuk melaksanakan tugas – tugas pendampingan PKH, dan terikat dengan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI. kemudian terikat oleh kode etik, sebagai berikut :

- a. Bersikap Sabar
- b. Mendengarkan dan tidak mendominasi
- c. Menghargai dan Rendah Hati

- d. Mau Belajar
- e. Bersikap Sederajat
- f. Bersikap Akrab dan Melebur
- g. Tidak Menggurui
- h. Berwibawah
- i. Tidak Memihak, Menilai dan Mengkritik
- j. Bersikap Terbuka dan Positif

Pendamping Sosial berkantor di UPPKH Kecamatan yang berada di Kantor Camat atau tempa lain yang di sediakan Pemerintah Daerah (PEMDA).

#### **4.2.9. Ciri-Ciri Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Yang Berhasil**

- a. Meningkatnya konsumsi Keluarga Peserta PKH
- b. Meningkatnya kualitas Kesehatan Peserta PKH
- c. Meningkatnya taraf pendidikan anak – anak Peserta PKH
- d. Meningkatnya perubahan perilaku positif Peserta PKH terhadap pentingnya kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan social
- e. Terpeliharanya taraf kesejahteraan sosial

#### **4.3 Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bandar Sei Kijang**

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bandar Sei Kijang sudah berjalan sejak tahun 2015. Setiap tahap mengalami pengurangan keluarga penerima manfaat program keluarga harapan sampai pada tahap keempat di tahun 2018 keluarga penerima manfaat program keluarga harapan tahap pertama berjumlah 405, tahap kedua berjumlah 389 berkurang, dan tahap ketiga berjumlah 388 berkurang sampai ketahap empat berjumlah 383. Tujuan dari pelaksanaan PKH di Kecamatan Bandar Sei Kijang yaitu untuk menjalankan amanat sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 bahwa negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI serta melaksanakan Permensos RI

No. 1 Tahun 2018, diharapkan dengan pelaksanaan PKH dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kecamatan Bandar Sei Kijang.

**Tabel 4.2 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Tahun 2018**

No	Tahapan pencairan dalam satu tahun	Jumlah KPM	Jumlah yang diberi per orang	Nominal
1	Tahap pertama	405	500.000	202.500.000
2	Tahap kedua	389	500.000	194.500.000
3	Tahap ketiga	388	500.000	194.000.000
4	Tahap keempat	383	266.350	102.012.050
<b>Jumlah</b>			<b>1.766.350</b>	<b>693.012.050</b>

Sumber : UPPKH Kecamatan Bandar Seikijang (Kantor Camat Bandar Seikijang, 2018)

Dalam melakukan kegiatan pelaksanaan program keluarga harapan ada petugas untuk memastikan bantuan tersalurkan kepada keluarga penerima manfaat serta melakukan pendampingan, adapun petugas yang bertugas dikecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, sebagai berikut :

**Tabel.4.4. Petugas PKH Kecamatan Bandar Sei Kijang**

No	Nama	Pendidikan	Jabatan	Wilayah Kerja
1	Akmal Yakin, S.H	S1 Hukum	Koordinator Kecamatan Pendamping Sosial	Dikecamatan Bandar Sei Kijng
2	Vivin Wulandari, M.Pd	S2 pendidikan	Pendamping Sosia	Dikecamatan Bandar Sei Kijang

Sumber ; UPPKH Kecamatan Bandar Sei Kijang ( Kantor Camat Bandar Sei Kijang,2018)

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 5.1. Karakteristik Informan

Informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini berjumlah 7 orang dan telah dipilih dengan metode *purposive sampling*. Berdasarkan pertimbangan peneliti, sumber informasi yang dipilih secara *purposive sampling* adalah sebagai sumber data yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti, lazimnya didasarkan atas kriteria atau pertimbangan bahwa informan tersebut dapat memberikan informasi yang relevan dan sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti.

Pada penelitian ini, proses wawancara atau pun pengambilan informasi yang relevan dilakukan kepada tim koordinasi PKH Kecamatan Bandar Sei Kijang dan tim pelaksana PKH kecamatan Bandar Sei Kijang dan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan, Hal ini bertujuan agar tim koordinasi dan tim pelaksana dapat memberikan informasi mengenai Pelaksanaan Evaluasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bandar Seikijang karena dianggap tim koordinasi dan tim pelaksana PKH, mengetahui bagaimana Evaluasi-Evaluasi dalam mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bandar Sei Kijang serta factor penghambat Evaluasi Program Keluarga Harapan. Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada beberapa keluarga penerima manfaat PKH yang dianggap dapat memberikan informasi yang relevan mengenai kinerja Pelaksana PKH di Kecamatan Bandar Sei Kijang

dan keluarga penerima manfaat PKH merupakan keluarga yang langsung merasakan manfaat dari program tersebut.

**Tabel 5.1. Karakteristik Informan**

No	Nama	Jabatan	Status	No. Informan
1	Wasarman, SE	Camat Bandar Sei Kijang	Tim Koordinasi Kecamatan Bandar Sei Kijang	Informan 7
2	Budi Hartoyo,S.H	Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Bandar Sei Kijang	Tim Koordinasi Kecamatan Bandar Sei Kijang	Informan 6
3	Akmal Yakin,S.H	Koordinator kecamatan Bandar Sei Kijang	Tim Pelaksana	Informan 5
4	Vivin Wulandari, M.Pd	Pendamping Sosial PKH Kecamatan Bandar Sei Kijang	Tim Pelaksana	Informan 4
5	Rusni Wati	Ketua KPM PKH	Penerima Bantuan	Informan 3
6	Asma	KPM komponen Reguler	Penerima Bantuan	Informan 2
7	Maryam	KPM Komponen Lansia	Penerima Bantuan	Informan 1

Sumber : Data Olahan Penulis

Berdasarkan tabel 5.1, diharapkan informan memberikan data yang relevan mengenai pelaksanaan Evaluasi program keluarga harapan di Kecamatan Bandar Sei Kijang, sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Program Keluarga Harapan dalam Penanganan kemiskinan Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Bandar Sei Kijang serta untuk mengetahui faktor – factor penghambat Evaluasi program keluarga harapan tersebut dapat terjawab.

## 5.2. Evaluasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan

Program keluarga harapan yang dirintis oleh kementerian sosial pada tahun 2007 merupakan suatu program khusus untuk pengentasan kemiskinan. Secara umum tujuan program keluarga harapan yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga penerima manfaat dan program keluarga harapan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang.

Awalnya program ini hanya sebuah program rintisan dan tahun 2012 dijadikan program nasional dan bahkan setiap tahun keluarga penerima manfaat program keluarga harapan terjadi perluasan lokasi baik provinsi, kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa. Seiring dengan penambahan lokasi tersebut tentunya banyak persoalan – persoalan di lapangan yang di hadapi, dengan adanya persoalan tersebut kegiatan – kegiatan di program keluarga harapan mengalami penilaian atau berevaluasi.

Pada penelitian ini, untuk menjawab rumusan permasalahan peneliti menggunakan teori dalam buku Kebijakan Publik Subarsono, (2005) evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut :

7. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan (derajat pencapaian sasaran dan tujuan).
8. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan (berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan).
9. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran output dari suatu kebijakan.
10. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.

11. Mengetahui penyimpangan (membandingkan sasaran dan tujuan dengan target).

12. Sebagai bahan masukan bagi kebijakan yang akan datang.

Artinya jika semua tujuan tersebut dapat terpenuhi dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kegiatan Program Keluarga Harapan, maka Evaluasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan di nyatakan Optimal dengan tujuannya yaitu mengentaskan dan menanggulangi kemiskinan.

### 5.2.1 Derajat pencapaian sasaran dan tujuan

Suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus jelas tujuan dan bagaimana cara untuk mencapai tujuannya, seperti tujuan PKH dalam waktu pendek menambah keuangan penerima bantuan sedangkan dalam jangka yang lama diharapkan keluar dari rantai kemiskinan. Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, komponen pendidikan, komponen kesejahteraan sosial dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat. Untuk menjawab persoalan ini tentunya yang lebih mengetahui tim koordinasi dan tim pelaksana program keluarga harapan.

Wawancara dilakukan Kepada ibu Vivin Wulandari,M.Pd sebagai tim pelaksana PKH di kecamatan Bandar Sei Kijang untuk mengetahui pencapaian dan tujuan program keluarga harapan pada tanggal 18 Oktober 2019 pukul 09.00 WIB, adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut :

#### **Informan 4 : Vivin Wulandari,M.Pd**

*...“ya program ini sudah mencapai umur 10 tahun, dari 2007 sampai sekarang berlanjut, begitupun dalam segi komponen ada penambahan, dari segi system pencairan, begitupun dengan peraturan – peraturan dalam pelaksanaan kegiatan PKH, pedoman peraturan baru sekarang Permensos No 1 Tahun 2018”.*

Selanjutnya dilakukan kembali wawancara kepada Bapak Akmal Yakin,S.H sebagai tim pelaksana PKH kecamatan sekaligus koordinator PKH dikecamatan Bandar Sei Kijang pada tanggal 21 oktober 2019 pukul 11.30 WIB.

**Informan 5 : Bapak Akmal Yakin, S.H**

*...“Program ini terus berlanjut, awalnya tahun 2007 sampai sekarang, komponennya bertambah, KPM nya juga bertambah, dan aturan ada terus pembaharuan dan memberi manfaat kepada yang kurang mampu”.*

Peneliti juga melakukan wawancara kepada bapak Budi Hartoyo,S.H sebagai kasi dan tim koordinasi PKH kecamatan Bandar Sei Kijang pada tanggal 22 Oktober 2019 pukul 14.00 WIB.

**Informan 6 :Bapak Budi Hartoyo,S.H**

*...“ya setau saya PKH ini tahun mulainya 2007 sampai sekarang, masuk ke Bandar Sei Kijang pada tahun 2015, ketika itu saya belum jadi kasi kessos”.*

Setelah melakukan wawancara kepada tim pelaksana dan tim koordinator PKH Kecamatan Bandar Sei Kijang, peneliti juga melakukan wawancara kepada bapak Camat Bandar Sei Kijang pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 09.30 WIB.

**Informan 6 : Bapak Wazarman,SE**

*...“ya, untuk tahun 2018 itu tercapai mesti pun harus dibenahi pada tahun berikutnya”.*

Berdasarkan hasil wawancara kepada tim pelaksana dan tim koordinasi PKH dikecamatan Bandar Sei Kijang, diketahui bahwa program keluarga harapan tepat sasaran dan tujuan untuk penanggulangan kemiskinan dikecamatan Bandar Sei Kijang baik. Pada tahun 2007 program keluarga harapan hanya program rintisan kemudian pada tahun 2012 dijadikan program nasional dan target pemerintah pusat pada tahun 2018 penerima bantuan 10 juta KPM, kemudian dari segi peraturan mengalami pembaharuan dan komponen terbaru dalam PKH yaitu komponen kesejahteraan sosial yang meliputi masyarakat miskin yang usia lanjut diatas 60 tahun dan penyandang disabilitas berat, kemudian pedoman kegiatan pelaksanaan PKH yang terbaru adalah Permensos No 1 Tahun 2018, dan dalam

segi efisiensi, akuntabilitas dan transparansi penyaluran bantuan sosial melalui sistem perbankan dibawah naungan himbara. Artinya pencapaian dan tujuan program keluarga harapan sudah optimal.

Berdasarkan data-data diatas,peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya tujuan dari program keluarga harapan kementerian sosial adalah untuk mengentaskan kemiskinan akan tetapi peneliti menemukan dilapangan masih banyak masyarakat yang dibawah angka kemiskinan dan tidak tercover oleh bantuan dari pemerintahan terkhusus program keluarga harapan.

### **5.2.2 berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan**

Mengukur tingkat efesiensi suatu kebijakan program PKH Dalam konteks ini pelaksanaan program keluarga harapan menunjukkan biaya dan manfaat dari suatu kebijakan program PKH pada penyaluran bantuan program keluarga harapan dialami oleh keluarga penerima manfaat oleh petugas maupun jumlah bantuan yang diterima. Dalam Evaluasi program keluarga harapan diharapkan perbedaan harus dapat diterima, baik perbedaan dasar pendapatan, jenis kelamin, usia dan kondisi fisik/ mental serta mengakui dan memberikan dukungan terhadap kemampuan yang berbeda. Untuk mengetahui biaya dan manfaat dari suatu kebijakan program PKH peneliti wawancara kepada keluarga penerima manfaat, karena objek yang dilayani oleh petugas keluarga penerima manfaat PKH.

Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Rusmi Wati selaku ketua kelompok keluarga penerima manfaat di kecamatan Bandar Sei Kijang pada tanggal 15 Oktober 2019 pukul 10.00 wib, adapun hasil wawancara sebagai berikut :

### **Informan 3 : Ibu Rusmi Wati**

...*“pelayanan oleh petugas sama kami sama pak tidak ada yang dibeda – bedakan dan hak kami mendapatkan bantuan uang sesuai ketentuan”*

Selanjutnya dilakukan kembali wawancara kepada Ibu Asma yang merupakan Keluarga Penerima Manfaat PKH Kecamatan Bandar Sei Kijang Komponen Reguler pada Tanggal 16 Oktober 2019 pukul 09.00 WIB.

### **Informan 2 : Ibu Asma**

...*“kalau dalam bantuan biaya kami semua nya sama saja pak”*

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Keluarga Penerima Manfaat PKH Komponen Kesejahteraan sosial (lanjut usia) yaitu Ibu Maryam pada Tanggal 17 Oktober 2019 pukul 09.00 WIB

### **Informan 1 :Ibu Maryam**

...*“sama saja pak, petugas pernah menjenguk saya kerumah “*

Berdasarkan wawancara kepada informan keluarga penerima manfaat semuanya sepakat mengatakan pelayanan biaya yang dilakukan petugas pelaksana PKH dikecamatan Bandar Sei Kijang sama, artinya tidak ada dibeda – bedakan dalam segi biaya.

Setelah melakukan wawancara kepada Keluarga Penerima Manfaat PKH, peneliti juga melakukan wawancara kepada Tim Pelaksana PKH di Kecamatan Bandar Sei Kijang, untuk mengetahui bagaimana biaya dan manfaat dari suatu kebijakan dalam pelaksanaan PKH, wawancara kepada Ibu vivin Wulandari,M.Pd selaku Pendamping PKH Kecamatan Bandar Sei Kijang pada tanggal 18 Oktober 2019 pukul 09.00.

#### **Informan 4 : Ibu Vivin Wulandari,M.Pd**

*...“tentunya dalam segi melayani, mengayomi semuanya sama tidak ada yang dibeda-bedakan, walaupun dia orang pendatang, semuanya sama, yang harus kami layani sebaiknya, akan tetapi jumlah bantuan antara komponen regular dengan disabilitas berat berbeda”.*

Kemudian wawancara dilakukan kepada Bapak Akmal Yakin,S.H yang merupakan Koordinator Kecamatan PKH di Kecamatan Bandar Sei Kijang pada tanggal 21 Oktober 2019 pukul 11.30 WIB

#### **Informan 5 : Bapak Akmal Yakin**

*...“Ya, kami selaku petugas melakukan pelayanan yang sama kepada semua KPM PKH, baik perempuan, lanjut usia, tapi khusus PKH ini yang menjadi pengurus ibuk ibuk, kalau dalam segi jumlah bantuan sama, komponen regular dan komponen kesejahteraan sosial mendapat bantuan setahun 1.890.000 / tahun”.*

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Budi Hartoyo,S.H yang merupakan tim koordinasi PKH kecamatan Bandar Sei Kijang pada tanggal 22 Oktober 2019 pukul 14.00 WIB.

#### **Informan 6 : Bapak Budi Hartoyo,S.H**

*...“ya sangat mementingkan lah, kami di PKH sama semuanya dalam biaya bantuan masyarakat baik perbedaan usia maupun fisik”.*

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Wazarman,SE yang merupakan Camat dikecamatan Bandar Sei Kijang pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 09.30 WIB

#### **Informan 7 : Bapak Wazarman,SE**

*...“kalau dari segi bantuannya berbeda, kalau KPM regular 1.890.000/tahun. Kalau disabilitas berat 2juta/tahun”.*

Berdasarkan hasil wawancara kepada keluarga penerima manfaat PKH, tim pelaksana dan tim koordinasi Kecamatan Bandar Sei Kijang, dapat

disimpulkan manfaat dari suatu kebijakan PKH semuanya sama, akan tetapi dalam jumlah biaya bantuan yang diberikan dibedakan.

**Tabel 5.2. Ketentuan Indeks dan Komponen Bantuan PKH**

No	Komponen Bantuan	Indeks Bantuan (Rp/tahun/KPM)
1	KPM Reguler	Rp.1.890.000,-
2	KPM Lanjut Usia	Rp.1.890.000,-
3	KPM Penyangang Disabilitas	Rp.2.000.000,-
4	KPM di Papua dan Papua Barat	Rp.2.000.000,-

Sumber : SK Menteri Sosial RI, 2017

Dari table 5.5 diatas dapat dilihat adanya perbedaan jumlah bantuan sosial terhadap tiap – tiap komponen, jika di pandang dari unsur biaya dan manfaat dari suatu kebijakan evaluasi pelaksanaan program keluarga harapan dikecamatan Bandar Sei Kijang belum optimal.

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan, kementerian sosial RI mengeluarkan biaya yang sangat banyak untuk membantu keluarga miskin keluar dari jeruji kemiskinan dan manfaat yang didapatkan oleh penerima bantuan sosial PKH yaitu dapat membantu ekonomi dalam hal memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan juga membantu membeli alat tulis mau pun kegiatan anak sekolah.

### 5.2.3 Outcome

Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran dari suatu kebijakan PKH hasil yang baik adalah manfaat jangka pendek sedangkan dampak positif adalah manfaat jangka panjang yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Untuk mengukur tingkat pengeluaran outcome program PKH peneliti wawancara kepada keluarga penerima manfaat, karena objek yang dilayani oleh petugas keluarga penerima manfaat PKH.

Dengan adanya PKH diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penerima yaitu dapat membantu memenuhi kehidupan sehari-hari sedangkan outcome yang diharapkan pemerintah yaitu berkurangnya angka kemiskinan.

Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Rusmi Wati selaku ketua kelompok keluarga penerima manfaat di kecamatan Bandar Sei Kijang pada tanggal 15 Oktober 2019 pukul 10.00 wib, adapun hasil wawancara sebagai berikut :

**Informan 3 : Ibu Rusmi Wati**

... *“manfaat yang saya rasakan bisa meringankan biaya rumah tangga”*

Selanjutnya dilakukan kembali wawancara kepada Ibu Asma yang merupakan Keluarga Penerima Manfaat PKH Kecamatan Bandar Sei Kijang Komponen Reguler pada Tanggal 16 Oktober 2019 pukul 09.00 WIB.

**Informan 2 : Ibu Asma**

... *“sangat terbantu bisa meringankan biaya anak sekolah”*

Setelah melakukan wawancara kepada Keluarga Penerima Manfaat PKH, peneliti juga melakukan wawancara kepada Tim Pelaksana PKH di Kecamatan Bandar Sei Kijang, untuk mengetahui bagaimana biaya dan manfaat dari suatu kebijakan dalam pelaksanaan PKH, wawancara kepada Bapak Akmal Yakin, S.H yang merupakan Koordinator Kecamatan PKH di Kecamatan Bandar Sei Kijang pada tanggal 21 Oktober 2019 pukul 11.30 WIB

**Informan 5 : Bapak Akmal Yakin**

... *“Berkurangnya angka kemiskinan dari tahap pertama 405 KPM sudah berkurang menjadi 383 KPM ”*

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Wazarman,SE yang merupakan Camat dikecamatan Bandar Sei Kijang pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 09.30 WIB

**Informan 7 : Bapak Wazarman,SE**

...*“harapan saya sebagai camat lebih berkurang lagi angka kemiskinan pada tahap berikutnya”*.

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan, pengeluaran biaya bantuan sangat besar untuk membantu masyarakat tidak mampu, kemudian peneliti juga mengamati outcome baik itu dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, dalam jangka pendek keluarga penerima bantuan sosial PKH merasa dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari kemudian harapan outcome dalam jangka yang panjang keluarga penerima bantuan sosial PKH dapat keluar rantai kemiskinan dan menjadi keluarga yang sejahtera sebagai mana tujuan tersebut juga diharapkan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian sosial.

**5.2.4 Dampak**

Sebuah kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah tentunya harus memiliki tujuan dan berdampak bagi kehidupan masyarakat ramai, begitupun kebijakan Program Keluarga Harapan diharapkan dampaknya bagi masyarakat miskin keluar dari jeruji kemiskinan. Dan dampak tersebut sesuai dengan tujuan secara umum Program Keluarga Harapan memiliki yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga penerima manfaat dan program keluarga harapan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang.

Penulis telah melakukan wawancara kepada ibu Rosma wati ketua kelompok keluarga penerima manfaat PKH untuk mengetahui bagaimana dampak PKH bagi kehidupan keluarga penerima manfaat di Kecamatan Bandar Sei Kijang? Apakah dengan program tersebut dapat merubah perilaku pola pikir dan kehidupan ekonomi? Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2019 pukul 10.00 wib, adapun hasil wawancara sebagai berikut :

**Informan 1 : Ibu Rosma wati**

*“ ya kalau dampak yang saya rasakan dapat menambah pendapatan keuangan keluarga, bisa bantu biaya anak sekolah pak”*

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Asma yang merupakan Keluarga Penerima Manfaat Komponen Reguler pada Tanggal 16 Oktober 2019 pukul 09.00 WIB.

**Informan 2 : Ibu Asma**

*“ ya Alhamdulillah dapat menambah pendapatan keluarga untuk kehidupan sehari – hari, bantu biaya anak sekolah dan biaya ke puskesmas kalau sakit “*

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Keluarga Penerima Manfaat PKH komponen kesejahteraan sosial ( Lansia umur 60 tahun keatas) di Kelurahan Sei Kijang yaitu Ibu Maryam pada Tanggal 17 Oktober 2019 pukul 09.00 WIB.

**Informan 3 : Ibu Maryam**

*“ dapat membantu biaya saya berobat”*

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan yang merupakan keluarga penerima manfaat PKH Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, informan pertama mengatakan dampak bantuan sosial PKH menambah keuangan keluarga dan anak sekolah, kemudian informan kedua menyatakan dampak PKH dapat menambah pemasukan keuangan sehari hari dan bias membantu biaya anak

sekolah dan berobat, selanjutnya informan ketiga mendapat bantuan sosial PKH komponen kesejahteraan sosial mengatakan dengan adanya bantuan tersebut bisa membantu untuk berobat.

Setelah melakukan wawancara kepada Keluarga Penerima Manfaat PKH, peneliti juga melakukan wawancara kepada Tim Pelaksana dan Tim Koordinasi PKH di Kecamatan Bandar Sei Kijang, untuk mengetahui bagaimana dampak PKH terhadap kehidupan keluarga penerima manfaat. wawancara kepada ibu Vivin Wulandari, M.Pd selaku Tim Pelaksanan PKH yang menjabat sebagai Pendamping PKH pada tanggal 18 Oktober 2019 pukul 09.00 WIB.

**Informan 4: Ibu Vivin Wulandari, M.Pd**

*“.. ya kalau kami sebagai petugas di kecamatan yang langsung bertatap muka dengan masyarakat yang mendapatkan bantuan kami harapkan dampaknya keluar dari kemiskinan, akan tetapi bantuannya 500ribu kita harapkan orang kaya ya tidak mungkin, akan tetapi dengan adanya bantuan tersebut kami sebagai petugas selalu menasehati supaya berpikir kedepannya jangan bermental miskin walapun kita miskin.*

Peneliti melanjutkan wawancara kepada Bapak Akmal Yakin, S.H selaku tim pengawai pelaksana PKH yang menjabat sebagai Koordinator Kecamatan Bandar Sei Kijang pada tanggal 21 Oktober 2019 pukul 11.30 WIB.

**Informan 5 :Bapak Akmal Yakin, S.H**

*...“ya kalau saya dikecamatan dampak yang saya lihat dalam waktu singkat menambah pendapatan KPM, sesuai dengan tujuan PKH yaitu dalam waktu dekat menambah penghasilan dan dalam waktu yang lama diharapkan keluar dari kemiskinan”*

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Budi Hartoyo, S.H selaku kasi kesejahteraan sosial di kecamatan Bandar Sei Kijang dan tim koordinasi PKH kecamatan Bandar Sei Kijang pada tanggal 22 Oktober 2019 pukul 14.00 WIB.

#### **Informan 6 :Bapak Budi Hartoyo,S.H**

*“.. kalau dampak nyata langsung keluar dari kemiskinan ya belum ada, kalau bentuk dampak dalam waktu dekat menambah pendapatan penerima bantuan, pola pikir akan pentingnya pendidikan dan kesehatan.*

Selanjutnya penelitian melakukan wawancara kepada Bapak Wazarman, SE sebagai Camat Bandar Sei Kijang pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 09.30 WIB.

#### **Informan 7 : Bapak Wazarman, SE**

*“ya dampak kalau dalam waktu singkat dapat menambah pendapatan keluarga penerima, dan dalam waktu yang panjang kami harapkan dapat keluar dari jeruji kemiskinan sesuai dengan tujuan program keluarga harapan”*

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam kepada keluarga penerima manfaat PKH, Tim Pelaksana PKH Kecamatan dan Tim Koordinasi PKH Kecamatan, dampak yang dirasakan oleh keluarga penerima manfaat dalam waktu dekat memang membantu keuangan keluarga penerima manfaat dalam kehidupan sehari-hari, dan dampak yang dirasakan dalam waktu yang panjang keluarga penerima manfaat tersebut diharapkan dapat keluar dari lingkaran kemiskinan akan tetapi dikecamatan Bandar Sei Kijang belum terlihat.Seperti para informan yang berasal dari keluarga penerima manfaat yang penulis ambil untuk memberikan informasi, akan tetapi dalam jarak waktu selama itu kehidupan perekonomian keluarga penerima manfaat belum juga ada perubahan, adapun keluarga penerima manfaat yang dianggap mampu oleh petugas kemudian dikeluarkan dari kepesertaan PKH karena yang bersangkutan sudah mampu sebelum mendapatkan bantuan.

Dapat disimpulkan bahwa dampak yang nyata (*tangible*) memutus rantai kemiskinan program keluarga harapan di Kecamatan Bandar Sei Kijang sudah optimal, dan bahkan dapat mengurangi angka kuantitas keluarga miskin.

Berdasarkan pengamatan peneliti, dampak PKH yang dirasakan oleh penerima bantuan yaitu dapat membantu keluarga penerima bantuan dalam ekonomi, membantu anak-anak penerima bantuan dalam mengakses pendidikan dan kesehatan, sementara dampak yang diharapkan pemerintah yaitu keluarga penerima bantuan sosial PKH dapat keluar dari rantai kemiskinan dan angka kemiskinan di Indonesia dapat berkurang ketika angka kemiskinan berkurang adalah suatu prestasi yang diperoleh oleh pemerintah terkhusus kementerian sosial.

#### 5.2.5 Target

Suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus jelas tujuan dan bagaimana cara untuk mencapai tujuannya, target pemerintah pusat pada tahun 2018 penerima bantuan 10 juta KPM, kemudian dari segi peraturan mengalami pembaharuan dan komponen terbaru dalam PKH yaitu komponen kesejahteraan sosial yang meliputi masyarakat miskin, kemudian pedoman kegiatan pelaksanaan PKH yang terbaru adalah Permensos No 1 Tahun 2018.

Peneliti melakukan wawancara kepada pak camat di kecamatan Bandar Sei Kijang pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 09.30 WIB.

#### Informan 7 : Bapak Wazarman, SE

*“ya, dalam tahun 2018 ini komensos belum ada target berapa yang dikeluarkan pemerintah itu yang diterimanya.”*

Peneliti melanjutkan wawancara kepada Bapak Akmal Yakin,S.H selaku tim pegawai pelaksana PKH yang menjabat sebagai Koordinator Kecamatan Bandar Sei Kijang pada tanggal 21 Oktober 2019 pukul 11.30 WIB.

**Informan 5 :Bapak Akmal Yakin,S.H**

*“tahun 2018 ini komensos belum ada target berapa yang diterimanya itu lah yang dikeluarkan.”*

Dan selanjutnya peneliti wawancara kepada ibu Vivin Wulandari,M.Pd selaku Tim Pelaksanaan PKH yang menjabat sebagai Pendamping PKH pada tanggal 18 Oktober 2019 pukul 09.00 WIB.

**Informan 4: Ibu Vivin Wulandari,M.Pd**

*“ya, dalam tahun 2018 ini komensos belum ada target berapa yang diterimanya saja dipemerintah.”*

**5.2.6 Sebagai bahan masukan bagi kebijakan yang akan datang.**

Dalam melakukan kegiatan evaluasi sebagai perbaikan perubahan supaya apa yang diinginkan tercapai maka peneliti melakukan wawancara kepada pelaksana PKH atau koordinator dikecamatan Bandar Sei Kijang.

Peneliti melakukan wawancara kepada pak camat di kecamatan Bandar Sei Kijang pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 09.30 WIB.

**Informan 7 : Bapak Wazarman, SE**

*“sebaiknya kedepan disekijang ada target dari KPM 383 menjadi 350 KPM.”*

Peneliti melanjutkan wawancara kepada Bapak Akmal Yakin,S.H selaku tim pegawai pelaksana PKH yang menjabat sebagai Koordinator Kecamatan Bandar Sei Kijang pada tanggal 21 Oktober 2019 pukul 11.30 WIB.

**Informan 5 :Bapak Akmal Yakin,S.H**

*“PKH harus ada perubahan.”*

Dan selanjutnya peneliti wawancara kepada ibu Vivin Wulandari,M.Pd selaku Tim Pelaksanaan PKH yang menjabat sebagai Pendamping PKH pada tanggal 18 Oktober 2019 pukul 09.00 WIB.

**Informan 4: Ibu Vivin Wulandari,M.Pd**

*“ya, PKH harus lebih baik lagi.”*

Berdasarkan pengamatan dilapangan, pada tahun 2018 kementerian sosial belum mempunyai target seberapa banyak keluarga miskin yang akan disejahterakan, berdasarkan wawancara dengan Camat kemudian petugas PKH, peneliti memberi masukan bahwasannya kedepannya harus ada target berapa banyak yang harus disejahterakan ditahun yang akan datang, terkhususnya dikabupaten Pelalawan dan kecamatan Sei Kijang.

**5.4. Faktor – Faktor Penghambat Evaluasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan**

Untuk menjawab persoalan ini peneliti melakukan wawancara kepada keluarga penerima manfaat, tim pelaksana PKH dan tim koordinasi PKH Kecamatan Bandar Sei Kijang, sebagai perbandingan data peneliti.

Telah dilakukan wawancara kepada Ibu Rusmiwati Ketua Kelompok Keluarga Penerima Manfaat PKH pada tanggal 15 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB, adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut :

**Informan 3 : Ibu Rusmiwati**

*...“ya kadang ada anggota saya yang kartun atmnya hilang, pinnya hilang,kadang atmnya terblokir, kasihan anggota saya pak pencairan bantuannya tertunda ”.*

Selanjutnya dilakukan kembali wawancara kepada Ibu Asma yang merupakan Keluarga Penerima Manfaat PKH Komponen Reguler pada tanggal 16 Oktober 2019 pukul 09.00 WIB.

**Informan 2 : Ibu Asma**

*...“paling kawan – kawan pinya hilang, atmnya terblokir, tapi kalau ada masalah sudah di perbaiki petugas pak”*

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Keluarga Penerima Manfaat PKH Komponen Kesejahteraan Lansia yaitu Ibu Maryam pada tanggal 17 Oktober 2019 pukul 09.00 WIB.

**Informan 1 : Ibu Maryam**

*...“kalau masalah saya tidak bisa kumpul karena tidak bisa jalan jauh – jauh, ”*

peneliti juga melakukan wawancara kepada Tim Pelaksana PKH di Kecamatan Bandar Sei Kijang, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Evaluasi PKH dikecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, wawancara kepada ibu Vivi Wulandari,M.Pd selaku Pendamping PKH pada tanggal 18 Oktober 2019 pukul 09.00 WIB.

**Informan 4 : Ibu Vivin Wulandari,M.Pd**

*...“kalau yang menghambat kegiatan kami ya belum didiklat FDS, sarana dan prasarana untuk kantor saja kami yang tugas dikecamatan bergabung dengan pak kasi kessos kecamatan Bandar Sei Kijang, kemudian budaya masyarakat ini belum siap dengan keuangan melalui perbankan”.*

Kemudian wawancara dilakukan kepada Bapak Akmal Yakin,S.H yang merupakan Koordinator PKH Kecamatan Bandar Sei Kijang pada tanggal 21 Oktober 2019 pukul 11.30 WIB.

### **Informan 5 :Bapak Akmal Yakin,S.H**

*...“ya factor yang menghambat kami dalam melakukan kegiatan kurangnya sarana dan prasarana, rekan – rekan belum didiklat FDS, data yang keluar dari pusat kadang ada yang sudah mampu tapi keluar juga, itulah kerja kami membersihkan data itu, kemudian hambatan ketika melakukan pencairan bantuan masyarakat yang menerima bantuan tersebut belum siap bertransaksi melalui online.*

Peneliti juga melakukan wawancara kepada bapak Budi Hartoyo,S.H yang merupakan Tim Koordinasi PKH kecamatan Bandar Sei Kijang pada tanggal 22 Oktober 2019 pukul 14.00 WIB.

### **Informan 6 : Bapak Budi Hartoyo,S.H**

*...“ya, kalau yang menghambat fasilitas kerja, kan petugas tersebut ada ruangan tersendiri , ada ATKnya, dan ada juga laporan kesaya ketika melakukan pencairan bantuan sosial kartunya hilang , terblokir, pin hilang, kadang mati lampu terkendala pada jaringan mesin EDC atau mesin ATM”.*

Peneliti juga melakukan wawancara kepada bapak camat Bandar Sei Kijang untuk mengetahui faktor penghambat dalam kegiatan PKH. Wawancara kepada Bapak Wazarman,SE selaku pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 09.30 WIB.

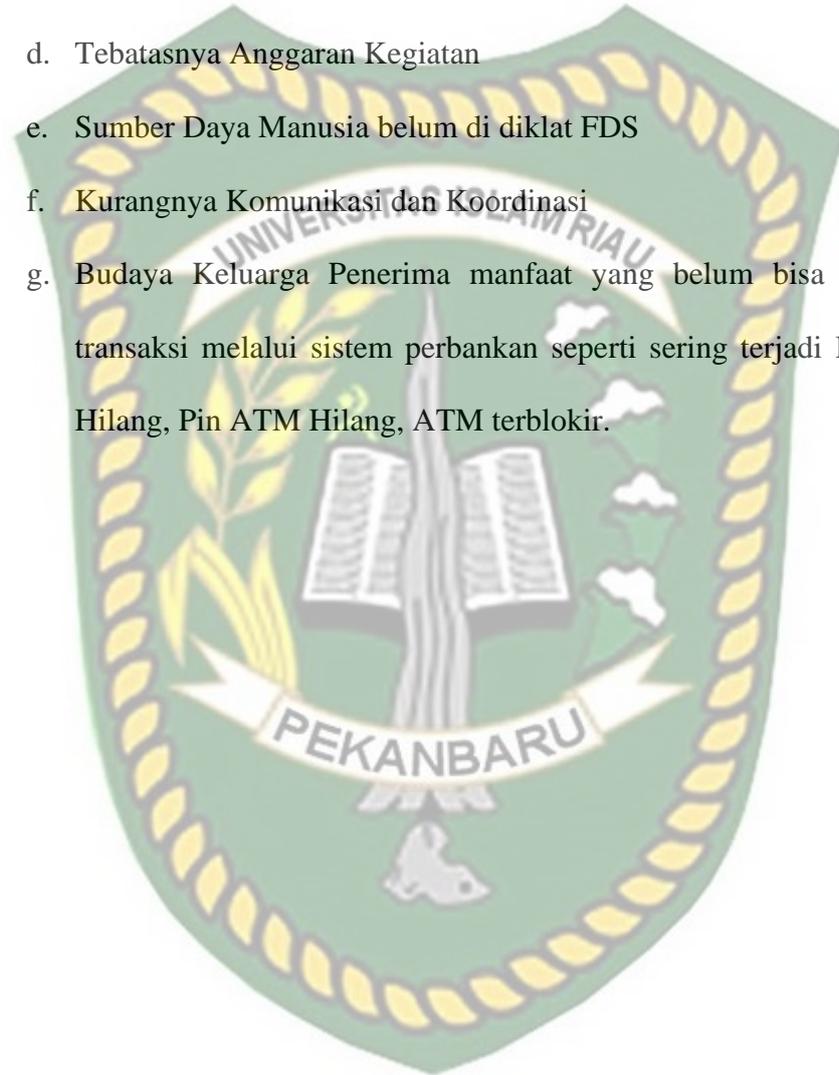
### **Informan 7 : Bapak Wazarman,SE**

*...“kalau yang menghambat ya anggaran sharing 5% untuk kegiatan – kegiatan PKH belum dianggarkan dengan baik kemungkinan karena pelalawan lagi defisit, kawan – kawan yang bertugas di kecamatan kantornya bergabung dengan kasi kessos kecamatan, kalau kasi nya paham ya syukur Alhamdulillah kalau tidak paham ya sabar saja, kemudian ada kawan – kawan yang belum didiklat FDS.*

Berdasarkan hasil wawancara kepada keluarga penerima manfaat, Tim Pelaksana PKH dan Tim Koordinasi Kecamatan Bandar Sei Kijang, Dapat penulis tarik kesimpulan bahwa faktor penghambat pelaksanaan Evaluasi program

keluarga harapan dikecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, sebagai berikut :

- c. Terbatasnya sarana dan prasarana
- d. Tebatasnya Anggaran Kegiatan
- e. Sumber Daya Manusia belum di diklat FDS
- f. Kurangnya Komunikasi dan Koordinasi
- g. Budaya Keluarga Penerima manfaat yang belum bisa melakukan transaksi melalui sistem perbankan seperti sering terjadi Kartu KKS Hilang, Pin ATM Hilang, ATM terblokir.



## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang Evaluasi Program Keluarga Harapan dalam Penanggulangan Kemiskinan Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan diperoleh hasil input, proses, output, outcome, benefit dalam pelaksanaan kegiatan belum optimal.

1. Evaluasi program keluarga harapan PKH dikecamatan Bandar Sei Kijang belum mencapai hasil yang diharapkan dimana dalam pelaksanaannya Terdapat beberapa keluarga yang dikata gorikan mampu tapi masih juga ada diberikan bantuan PKH sementara tujuannya mengatasi kemiskinan, kemudian kementerian sosial mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk memberikan bantuan dengan harapan meningkatkan kehidupan penerima bantuan supaya keluar dari rantai kemiskinan malah sebaliknya banyak yang merasa miskin.
2. Faktor yang menghambat program keluarga harapan dikecamatan Bandar Sei Kijang antara lain adalah: sarana dan prasarana yang belum terpenuhi, Komunikasi dan kordinasi yang kurang efektif, sumber daya manusia atau petugas PKH yang belum diklat, tidak berjalannya bisnis PKH yaitu FDS atau kegiatan pemberdayaan yang tidak berjalan tidak semestinya, Faktor kecemburuan sosial antara masyarakat yang tidak menerima PKH kepada masyarakat yang menerima PKH

## 6.2 Saran

Mengukur pelaksanaan Evaluasi sebuah kebijakan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena Evaluasi kebijakan dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Evaluasi kebijakan program keluarga harapan dalam penanggulangan keluarga penerima manfaat di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan sama halnya dengan program pemerintah lainnya, yaitu membutuhkan hubungan kordinasi yang baik antara sesama pelaksana program dan penerima program karena jika dilihat secara keseluruhannya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pelaksanaan Evaluasi program keluarga harapan di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan. Jika dilihat berdasarkan teori Subarsono tentang Pelaksanaan Evaluasi, maka saran yang dapat diberikan untuk pelaksanaan program keluarga harapan di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan adalah;

1. Dampak yang dirasakan keluarga penerima manfaat dalam waktu dekat menambah keuangan keluarga, sementara dampak dalam jangka panjang diharapkan keluar dari rantai kemiskinan belum terlihat, adapun yang di *graduasi* atau dikeluarkan oleh petugas dalam kepesertaan PKH disebabkan sudah mampu, yang bersangkutan sudah mampu sebelum mendapatkan bantuan PKH, diharapkan kepada actor pelaksana tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan benar – benar diverifikasi dan divalidasi keluarga – keluarga yang seharusnya mendapat bantuan sesuai syarat – syarat dan komponen yang telah

ditetapkan sehingga bantuan tersebut tepat sasaran, adapun keluarga penerima manfaat yang sudah mampu tetapi belum di *graduasi* atau dikeluarkan diharapkan para actor pelaksana bias mengambil langkah yang tepat, tanggap dan sesuai prosedur.

2. Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk pemberdayaan FDS (*family development sessions*) dapat dikatakan belum terlaksana secara optimal, diharapkan para actor pelaksana program keluarga harapan actor pelaksana ditingkat kecamatan melakukan kegiatan pemberdayaan melalui FDS dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena dalam pelaksanaan program keluarga harapan FDS sangat penting memberikan bekal keilmuan dan keterampilan bagi keluarga-keluarga penerima manfaat PKH, sehingga apa bila suatu saat keluarga penerima manfaat di *graduasi* dikeluarkan dari kepesertaan PKH setidaknya ada bekal ilmu dan keterampilan yang diperoleh, jika ilmu adalah tiang kehidupan maka FDS adalah tiang PKH.
3. Diharapkan dikementrian sosial atau dinas sosial kabupaten pelalawan kedepannya membuat target berapa banyak jumlah KPM yang akan disejahterakan
4. Para actor pelaksana tingkat kecamatan maupun keluarga penerima manfaat PKH diharapkan membuat suatu ide gagasan atau sesuatu yang kreatif sehingga ide tersebut dapat ditransfer atau dicontoh daerah lain dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan PKH,

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arikunto, Suharsimi dan Cepi Abdul Jabar, Safaruddin.2009. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta :Bumi Aksara.
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijakan :*dari Formasi Ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Bumi Aksara. Jakarta.
- AR, Mustopadjaja. 2004 *Manajemen Proses Kebijakan Publik (Formasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja)*. Jakarta :lembaga administrasi
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian :Suatu Pendekatan Praktis Edisi Revisi*. Jakarta : Rieneka Cipta.
- Athoillah, Anton. 2010. *Dasar – Dasar Manajemen*.Bandung : CV Pustaka Setia.
- Agus Harjitodan Martono. 2007. *Manajemen Keuangan*.Yogyakarta :Ekonisia.
- Emzir, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Hikmat, Harry. 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Humaniora Utama Press.
- Kartasasmitra, Ginandjar. 2006. *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta.
- Nugroho, D Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta:PT. Elex Media Komputindo.
- Sulistiyani, AmbarTeguh. 2004. *Kemitraandan Model Model Pemberdayaan*. Yogyakarta :Gava Media.
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*.Bandung : PT.Rafika Aditama.
- Suyanto, Bagong. 1995. *Perangkap Kemiskinan - Problem & Strategi Pengentasannya*. Surabaya : Airlangga Univessity Press.
- Subarsono AG, 2005, *Analisi Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Media Pressindo, Yogyakarta.
- Siagian, Matias. 2012. *KemiskinanandanSolusi*. Medan :PT.GrasindoMonoratama.

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Satori Djam'ah, Komariah Aan. 2014. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Todaro, Micheal.C.Smith, Steph.2008. *Ekonomi Pembangunan JilidI (Edisi9)*.Jakata :Erlangga.

Umar Husein, 2004. *Metode Riset Ilmu Administrasi Negara, Pembangunan, dan Niaga*.Jakarta : Graedia Pustaka Utama.

Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi keImplementasi Kebijakan Negara*.Jakarta :BumiAksara.

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan dan Proses Kebijakan Public*. Yogyakarta: Media Pressindo. Peraturan Perundangan.

Wrihatnolo, Randy R, dkk. 2007. *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan*. Jakarta :PT. Elex Media Komputindo.

#### **Dokumen/Jurnal/Tesis**

Ainul Hayati, Tesis, UI. 2012. *Analisis Resiko Kemiskinan Rumah Tangga di Provinsi Banten*.

Mubarak, Zaki. *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan*.Universitas Diponegoro. 2010.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 34

Undang – Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Permensos No 01 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan